

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN YAYASAN NIDAUL ISHLAH  
DALAM PENETAPAN KURIKULUM PENDIDIKAN BAGI  
SISWA SD ISLAM TERPADU (SDIT) MUTIARA HATI  
PURWOKERTO**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Pendidikan (S. Pd.)**

**IAIN PURWOKERTO**

**Oleh  
AFIFAH NUR ISTIQOMAH  
NIM. 1522401004**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Afifah Nur Istiqomah  
NIM : 1522401004  
Prodi : S-1  
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**Implementasi Kebijakan Yayasan Nidaul Ishlah Dalam Penetapan Kurikulum Pendidikan Bagi Siswa SD Islam Terpadu (SDIT) Mutiara Hati Purwokerto**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dalam gelar akademik saya peroleh.

Purwokerto, 3 September 2019

Saya Menyatakan,



**Afifah Nur Istiqomah**

NIM. 1522401004



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto  
Telp : 0281-635624, 628250, Fak. 0281-63655

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN YAYASAN NIDAU ISHLAH  
DALAM PENETAPAN KURIKULUM PENDIDIKAN BAGI SISWA  
SD ISLAM TERPADU (SDIT) MUTIARA HATI PURWOKERTO**


Yang disusun oleh : Afifah Nur Istiqomah, NIM : 1522401004, Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, yang telah diujikan pada tanggal 30 September 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Pendidikan (S.Pd.)** pada sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 10 Oktober 2019

Disetujui Oleh:


Penguji I / Ketua Sidang / Pembimbing,

Penguji II/ Sekretaris Sidang,

  
Dr. H. Suwito, M. Ag.  
NIP. 19710424 199903 1 002

  
Dewi Ariyani, M. Pd. I.  
NIP. 19840809 201503 2 003

Penguji Utama,

  
Dr. Subur, M. Ag.  
NIP. 19670307 199303 1 005

Diketahui Oleh:

Dekan,

  
Dr. H. Suwito, M. Ag.  
NIP. 19710424 199903 1 002



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 5 September 2019

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Afifah Nur Istiqomah  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan FTIK IAIN Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

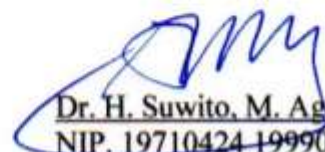
Nama : Afifah Nur Istiqomah  
NIM : 1522401004  
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan  
Judul : Implementasi Kebijakan Yayasan Nidaul Ishlah Dalam Penetapan Kurikulum Pendidikan Bagi Siswa SDIT Mutiara Hati Purwokerto

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



Dr. H. Suwito, M. Ag.  
NIP. 19710424-199903 1 002

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN YAYASAN NIDAU ISHLAH DALAM PENETAPAN KURIKULUM PENDIDIKAN BAGI SISWA SD ISLAM TERPADU (SDIT) MUTIARA HATI PURWOKERTO

Afifah Nur Istiqomah

1522401004

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahap-tahap dalam implementasi kebijakan yayasan Nidaul Ishlah yang berkaitan dengan hal penetapan kurikulum pendidikan bagi siswa SDIT Mutiara Hati Purwokerto. Mengingat bahwa setiap lembaga pendidikan formal di Indonesia memiliki kebijakan beragam versi dan tidak semuanya sama. Kebijakan dalam hal penetapan kurikulum siswa yang dapat diartikan sebagai program yang menjadi kebutuhan vital yang di dalamnya memuat sejumlah materi atau bahan ajar yang harus ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah pengetahuan dan sebagai salah satu upaya penentu keberhasilan dalam proses pendidikan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis datanya adalah kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Yayasan Nidaul Ishlah Banyumas dan SDIT Mutiara Hati sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yayasan. Subjek penelitian adalah Ketua Yayasan Nidaul Ishlah, Ketua Lajnah Pendidikan dan Pembelajaran (LPP), Kepala SDIT Mutiara Hati Purwokerto, Kepala Tahfidzul Qur'an, Kepala Biah Islamiyyah, Guru, dan Siswa. Objek penelitian adalah implementasi kebijakan yayasan Nidaul Ishlah dalam penetapan kurikulum pendidikan bagi siswa SDIT Mutiara Hati Purwokerto. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Yayasan Nidaul Ishlah dalam penetapan kurikulum pendidikan bagi siswa SDIT Mutiara Hati Purwokerto terbagi menjadi lima tahap yakni *pertama* tahap sosialisasi dan uji coba yang di dalamnya memuat kegiatan manajemen yakni perencanaan dan pengorganisasian. *Kedua* tahap validasi atau perbaikan dan penyempurnaan kebijakan. *Ketiga* tahap implementasi penuh secara keseluruhan dilanjutkan tahap *keempat dan kelima* yakni monitoring dan evaluasi kebijakan dengan setiap tahapannya mengedepankan nilai humanisme dan religiusitas yang tinggi untuk target pencapaian keberhasilan program kebijakan.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Kurikulum, SDIT Mutiara Hati Purwokerto

## **MOTTO**

Tidak sedikit manusia yang semakin berilmu semakin sulit diberitahu

(Ustadz Jefri Al-Buchori)



## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillahirabbil'alamiin*

Puji syukur kepada Allah SWT, dengan segala nikmat, karunia dan ridho Allah SWT skripsi ini mampu terselesaikan.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua tercinta yaitu Ibu Uswatun Chasanah dan Bapak Anwar yang doanya selalu mengalir dalam setiap langkahku, terimakasih untuk setiap do'a yang kalian langitkan, nasehat, motivasi, tetes keringat, dukungan moral dan moril yang tak terhingga serta kesucian air mata yang penuh dengan kasih sayang selalu kalian perjuangkan demi putri kalian agar mendapat kebahagiaan.

Untuk adikku yang amat ku sayangi yaitu Nur Annisa yang selalu memberikan motivasi, kebahagiaan dan keceriaan dalam keseharianku.

Keluarga besar tercinta, serta sahabat-sahabatku terimakasih atas do'a, dukungan, dan kasih sayang yang kalian berikan.

Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Almamaterku tercinta, IAIN Purwokerto.

**IAIN PURWOKERTO**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim...

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Yayasan Nidaul Ishlah Dalam Penetapan Kurikulum Bagi Siswa SD Islam Terpadu (SDIT) Mutiara Hati Purwokerto”. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa petunjuk kebenaran seluruh umat manusia yaitu Ad-Dinul Islam yang kita harapkan syafa’atnya di dunia dan di akhirat.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, arahan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Dr. H. Suwito, M.Ag Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
2. Dr. Suparjo, M.A Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
3. Dr. Subur M.Ag Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
4. Dr. Sumiarti, M.Ag. Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
5. Rahman Afandi, S.Ag., M.S.I., Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
6. Dr. Ahsan Hasbullah, M.Pd. Penasehat Akademik MPI A Angkatan 2015/2016 Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Purwokerto
7. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto



8. Arif Hidayatulloh Selaku Ketua Yayasan Nidaul Ishlah Banyumas, yang telah memberikan izin serta bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Luthfi Arif Ramdhani, S.Pd. Kepala SDIT Mutiara Hati Purwokerto yang banyak memberikan banyak bantuan serta motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik
10. Segenap Jajaran Pengurus Yayasan Nidaul Ishlah Banyumas, Dewan Guru, Karyawan dan Siswa-Siswi SDIT Mutiara Hati Purwokerto, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
11. Kedua orang tua yakni Ibu Uswatun Chasanah dan Bapak Anwar yang senantiasa doanya selalu mengalir dalam setiap langkahku, terimakasih untuk setiap do'a yang kalian langitkan, nasehat, motivasi, tetes keringat, dukungan moral dan moril yang tak terhingga, serta kesucian air mata yang penuh dengan kasih sayang selalu kalian perjuangkan demi putri kalian agar mendapat kebahagiaan
12. Adikku tersayang yaitu Nur Annisa yang selalu memberikan memberikan motivasi, dukungan semangat, kebahagiaan dan keceriaan setiap harinya
13. Sahabat-sahabatku yaitu Damas Setyo Bimo Inzagi, Ratih Kusuma Dewi, Halimah Sa'diah, Nur Fatikkah, dan Eka Septiani Sarastuti terimakasih atas do'a, dukungan, dan kasih sayang yang kalian berikan sehingga dalam penulisan skripsi ini penulis selalu beroptimis untuk menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu
14. Keluarga besar MPI A angkatan 2015/2016 yang telah memberikan kebahagiaan, kasih sayang, cinta, dukungan, dan pengalaman kepada penulis serta terimakasih atas perjuangan dan kerjasama kalian selama empat tahunnya.
15. Semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya. Semoga perjuangan kita akan diberkahi Allah SWT.

Tidak ada yang dapat penulis sampaikan kecuali ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya serta permohonan maaf. Semoga segala bantuan yang diberikan akan diberi balasan yang lebih baik oleh Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari

akan kekurangan yang dimiliki, sehingga dalam penyusunan skripsi terdapat banyak kesalahan serta kekurangan, baik dari segi kepenulisan maupun dari segi keilmuan. Maka penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran guna perbaikan di masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis serta bagi pembaca nantinya.

Purwokerto, 3 September 2019

Penulis,



Afifah Nur Istiqomah

NIM. 1522401004



IAIN PURWOKERTO

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	5
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENETAPAN KURIKULUM</b>	
A. Konsep Kebijakan Pendidikan.....	15
1. Pengertian Kebijakan Publik .....	15
2. Pengertian Kebijakan Pendidikan.....	16
3. Urgensi Kebijakan .....	17
4. Bentuk-Bentuk Kebijakan.....	18
5. Proses Pembuatan Kebijakan.....	20
6. Implementasi Kebijakan .....	22

B. Konsep Kurikulum .....	31
1. Pengertian dan Fungsi Kurikulum .....	31
2. Teori-Teori Kurikulum .....	32
3. Ruang Lingkup Perubahan Kurikulum .....	34
4. Landasan Pengembangan Kurikulum .....	39
5. Manajemen Kurikulum .....	40
6. Evaluasi Kurikulum .....	42

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	45
B. Lokasi Penelitian .....	46
C. Subjek Penelitian .....	47
D. Objek Penelitian .....	49
E. Teknik Pengumpulan Data .....	49
F. Teknik Analisis Data .....	51

### **BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Yayasan Nidaul Ishlah dan SDIT Mutiara Hati Purwokerto.....	54
1. Sejarah Berdirinya .....	54
2. Visi, Misi, dan Tujuan .....	55
3. Target Mutu SDIT Mutiara Hati Purwokerto .....	56
4. Struktur Organisasi .....	60
5. Keadaan Sumber Daya Manusia.....	60
6. Keadaan Sarana dan Prasarana .....	61
7. Prestasi Siswa SDIT Mutiara Hati Purwokerto .....	61
B. Penyajian Data.....	62
1. Sosialisasi dan Uji Coba Kebijakan (Tahap Penyiapan) .....	63
2. Validasi (Perbaikan dan Penyempurnaan).....	68
3. Implementasi Kebijakan .....	69
4. Monitoring Kebijakan.....	76
5. Evaluasi Kebijakan .....	77

6. Kendala-Kendala Kebijakan.....	79
C. Analisis Data.....	80

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran-Saran.....	88
C. Kata Penutup.....	88

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	21
Tabel 2.....	34
Tabel 3.....	35
Tabel 4.....	37
Tabel 5.....	38



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Foto-Foto Kegiatan
- Lampiran 2 Pedoman Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi
- Lampiran 3 Hasil Wawancara
- Lampiran 4 Surat Keterangan Wawancara
- Lampiran 5 SK Pendirian Sekolah
- Lampiran 6 Sertifikat Akreditasi
- Lampiran 7 Visi, Misi, dan Tujuan
- Lampiran 8 Identitas Sekolah
- Lampiran 9 Struktur Organisasi
- Lampiran 10 Data Guru
- Lampiran 11 Data Karyawan
- Lampiran 12 Data Daya Tampung Siswa
- Lampiran 13 Data Keadaan Sarana dan Prasarana
- Lampiran 14 Kalendar Pendidikan
- Lampiran 15 Struktur Kurikulum SDIT Mutiara Hati Purwokerto
- Lampiran 16 Data Program Semester
- Lampiran 17 RKH dan RKP
- Lampiran 18 Pencapaian Target Tahfidz Al-Qur'an
- Lampiran 19 Pemetaan Tema Adab
- Lampiran 20 PERMENDIKBUD Nomor 57 Tahun 2014
- Lampiran 21 Contoh Modul Tematik
- Lampiran 22 Modul PAI
- Lampiran 23 Surat-Surat Penelitian

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan berakar pada budaya bangsa, di mana proses pendidikan adalah suatu proses pengembangan potensi peserta didik sehingga mereka mampu menjadi pewaris dan pengembang budaya bangsa. Melalui pendidikan berbagai nilai dan keunggulan budaya di masa lampau diperkenalkan, dikaji, dan dikembangkan menjadi budaya bagi dirinya, masyarakat, dan bangsa yang sesuai dengan zaman dimana peserta didik tersebut hidup dan mengembangkan diri.<sup>1</sup> Sejak berlakunya Undang-Undang No 22 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, maka pengelolaan teknis operasional penyelenggaraan pendidikan dasar di Indonesia menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah kabupaten, kecuali pengelolaan RA/MI/MTs.

Tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pendidikan adalah menetapkan standar-standar penyelenggaraan pendidikan dasar, antara lain mencakup standar isi kurikulum, standar kompetensi, hingga standar penilaian proses dan hasil belajar peserta didik.<sup>2</sup> Di mana dalam dunia pendidikan, ada tiga konsep tentang kurikulum yakni (1) kurikulum sebagai substansi, (2) kurikulum sebagai sistem, dan (3) kurikulum sebagai bidang studi.<sup>3</sup> Oleh karena itu, jantung dari penyelenggaraan pendidikan yang paling vital yakni pengelolaan dan struktur kurikulum yang diterapkan oleh suatu lembaga pendidikan.

Berbicara mengenai lembaga pendidikan, di Indonesia banyak terdapat lembaga pendidikan baik bersifat formal maupun nonformal, dan dibawah kendali pusat kedinasan maupun yayasan. Masing-masing lembaga

---

<sup>1</sup> Daryanto, *Pendekatan Pembelajaran Sainifik Kurikulum 2013*, (Yogyakarta: Gava Media, 2014), hlm. 1.

<sup>2</sup> Zainal Arifin, *pengembangan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2012), hlm. 11.

<sup>3</sup> Abdul Manab, *Manajemen Perubahan Kurikulum*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 2.



pendidikan didalamnya memiliki kebijakan beragam versi dan tidak semuanya sama. Di mana proses kebijakan tidak dapat terlepas dengan adanya kegiatan manajemen di dalamnya. Kebijakan itu sendiri memiliki arti rencana kegiatan atau pernyataan tujuan-tujuan ideal.<sup>4</sup> Kebijakan dalam pendidikan tidak terlepas dari pertanyaan mengenai apakah manusia itu atau apakah hakikat manusia itu. Selanjutnya jawaban terhadap hakikat manusia akan membawa kepada pertanyaan apakah sebenarnya tujuan hidup manusia di dunia ini dan bagaimana manusia itu dapat mewujudkan tujuan tersebut. Pengertian yang tepat mengenai hakikat proses pendidikan itu akan melahirkan berbagai kebijakan pendidikan, salah satunya mengenai kebijakan dalam menetapkan kurikulum sekolah. Kurikulum sendiri dapat diartikan sebagai suatu alat atau sejumlah mata ajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh peserta didik untuk memperoleh sejumlah pengetahuan.<sup>5</sup>

Kurikulum tidak dapat berjalan apa adanya, karena di sisi lain kurikulum merupakan sebuah sistem yang mempunyai keterkaitan satu sama lain dan mengalami modifikasi atau perubahan dalam penerapannya.<sup>6</sup> Tidak bisa dipungkiri bahwa kurikulum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam lembaga pendidikan, yaitu sebagai salah satu penentu keberhasilan pendidikan. Perubahan kurikulum selalu mengarah pada perbaikan sistem pendidikan dan perubahan tersebut dilakukan dengan didasari pada permasalahan pelaksanaan kurikulum sebelumnya yang dianggap kurang maksimal baik secara materi maupun sistem pembelajarannya sehingga adanya permasalahan ini menimbulkan adanya revisi atau perbaikan kurikulum. Adanya revisi kurikulum ini bertujuan untuk menciptakan perubahan yang lebih baik untuk sistem pendidikan di Indonesia.

Revisi kurikulum yang mendasari kebijakan pemberlakuan kurikulum 2013 tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas

---

<sup>4</sup> Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 131.

<sup>5</sup> Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), hlm. 16.

<sup>6</sup> Ikbal Ridoi, *Kurikulum Pendidikan di Sekolah Alam Banyu Belik Kedungbanteng Tahun 2011/2012*, skripsi IAIN Purwokerto Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2012) hlm. 7.

pendidikan di Indonesia, baik menyangkut penyelenggaraan maupun *outputnya*. Bagaimanapun lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan pendidikan yang berkualitas memaksa pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis, salah satunya adalah dengan melakukan revitalisasi kurikulum di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan. Pada kurikulum 2013, pemerintah menetapkan standar nasional pendidikan, kerangka dasar dan struktur kurikulum, silabus, dan pedoman implementasi kurikulum. Sedangkan setiap satuan pendidikan seperti halnya pada kurikulum 2006 (KTSP) juga menyusun kecuali dokumen, yang berupa silabus setiap mata pelajaran yang disusun oleh pemerintah dan dipakai sebagai acuan oleh para guru untuk pembuatan RPP.<sup>7</sup>

Berdasarkan observasi pendahuluan yang peneliti lakukan di Yayasan Nidaul Ishlah Kabupaten Banyumas dan berfokus pada salah satu lembaga pendidikan formal di dalamnya yakni SD Islam Terpadu (SDIT) Mutiara Hati Purwokerto, bahwa Yayasan Nidaul Ishlah menetapkan dan menerapkan kurikulum untuk jenjang sekolah dasar yaitu sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah yang sering disebut kurikulum nasional atau Kurikulum 2013 (Tematik) dengan perubahan kurikulum sebelumnya yakni kurikulum 2006 (KTSP) yang di *taswiyahkan* atau dipilah-pilah dan harus diselipkan nilai-nilai Islam. Sesuai kebijakan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang penetapan kurikulum 2013 Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah yang memutuskan dalam pasal 1 ayat (2) sebagaimana berbunyi :

“Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, silabus, serta pedoman mata pelajaran dan pembelajaran tematik terpadu.”

Di dalamnya juga menerapkan kurikulum yang menjadi ciri khas dan menjadi suatu keharusan yang menjadi kebijakan yayasan yakni kurikulum pendidikan karakter berbasis fitrah. Bentuk kebijakan yayasan ini merupakan

---

<sup>7</sup> H. M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 169.

bentuk kebijakan konvensi atau kesepakatan umum yang masih bersifat non formal atau belum terdokumentasikan dalam bentuk surat keputusan maupun surat tugas karena mobilitas kegiatan sekolah masih dikatakan cukup tradisional,<sup>8</sup> namun pada awalnya kebijakan ini dicetuskan oleh salah seorang pendiri yayasan pada tahun 2009 yakni Ustadz Mulyanto dalam pemaparannya dengan jajaran yang terlibat di dalamnya bahwa pembelajaran harus berdasarkan iman, ilmu, dan amal maka dari itu tercetuslah suatu kebijakan yang telah disepakati bersama yakni penerapan kurikulum pendidikan karakter berbasis fitrah. Dalam kurikulum pendidikan karakter berbasis fitrah, terdapat 3 pilar yang menjadi poin penting dalam pembelajaran yang digagaskan dalam visi sekolah “Melahirkan Generasi Penghafal Al-Qur’an Berkarakter Rabbani” yakni (1) Tahfidzul Qur’an atau menghafal Al-Qur’an, (2) Biah Islamiyyah atau Adab-Adab, (3) Pembelajaran Inti. Yang dibagi kembali dalam enam indikator yakni Al-Qur’an, Hadits, Adab, Linguistik, Akademik, dan Fiqh Sirhah. Untuk pembelajaran umum dijenjang SD menggunakan modul tersendiri, sedangkan pembelajaran PAI untuk materi disusun oleh tim sekolah dan yayasan.

Selain itu, yayasan beserta lembaga formal di dalamnya yang bisa dikatakan masih cukup baru yakni berdiri pada tahun 2009 namun persaingannya sangat ketat dengan sekolah formal lainnya menjadikan semangat serta optimisme untuk seluruh komponen yang ada agar lebih terpacu dalam menuai prestasi yang lebih banyak lagi. Dalam kegiatan operasional di dalamnya sangat mengutamakan nilai-nilai Agama sehingga menjadi pembeda bagi sekolah formal lainnya. Penempatan ruang kelas, ruang guru, kamar madi, hingga kantin yang dibuat secara terpisah tersendiri antara laki-laki dan perempuan. Bahkan di jenjang sekolah dasarnya, kepemimpinan kepala sekolah pun dibagi secara terpisah yakni kepala sekolah ikhwan dan kepala sekolah akhwat, walaupun dalam kacamata dinas hanya diberlakukan satu, namun dalam kegiatan intern sekolah keduanya

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Ustadz Naryo sebagai penanggungjawab Lajnah Pendidikan dan Pembelajaran (LPP) Yayasan Nidaul Ishlah Purwokerto, Senin 20 Mei 2019. Pukul 10.30 WIB.

berperan penting dalam jajaran yang sama sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru.<sup>9</sup>

Dengan adanya kebijakan tersebut sangat diharapkan berpengaruh pada hasil belajar siswa. Walaupun aspek yang ditekankan yayasan untuk sekolah tersebut lebih dominan pada gerakan menghafal Al-Qur'an, namun siswa-siswi tetap unggul dalam potensi di bidang akademik seperti mahir dalam kemampuan berhitung, memperhatikan adab dan beretika yang baik, cakap dalam berpuisi dan membuat cerita pendek, serta adanya praktik kewirausahaan yang diselenggarakan sekolah untuk melatih kemandirian siswa. Dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai "Implementasi Kebijakan Yayasan Nidaul Ishlah Dalam Penetapan Kurikulum Pendidikan Bagi Siswa SD Islam Terpadu (SDIT) Mutiara Hati Purwokerto".

## B. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan menghindari kesalahpahaman terhadap judul yang penulis buat, maka penulis menjelaskan dan membatasi kata kunci yang terdapat dalam judul penelitian skripsi ini yaitu:

### 1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*) implementasi yaitu pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan dalam pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang). Sedangkan haikatnya, kebijakan merupakan suatu kata benda hasil dari deliberasi mengenai tindakan (*behavior*) atau suatu tindak dalam pengambilan keputusan oleh seorang atau sekelompok pakar mengenai rambu-rambu tindakan dari seseorang atau lembaga untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu kebijakan mempunyai makna internasional. Oleh sebab itu, kebijakan mengatur tingkah laku seseorang

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Ustadz Budi sebagai Mudhir 'Am (Direktur) Yayasan Nidaul Ishlah Purwokerto, Senin, 11 Februari 2019. Pukul 08.30 WIB.

atau organisasi dan kebijakan meliputi pelaksanaan serta evaluasi dari tindakan tersebut. Hasil evaluasi tersebut akan menentukan bobot serta validitas dari kebijakan tersebut. Suatu kebijakan dapat berpengaruh dalam mobilitas manajemen organisasi, dimana manajemen merupakan proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penetapan tujuan.<sup>10</sup> Kebijakan yang sering kita dengar yakni kebijakan-kebijakan publik yang merujuk pada semua wilayah tindakan pemerintah yang membentang dari kebijakan ekonomi hingga kebijakan yang merujuk pada rubrik kebijakan sosial termasuk didalamnya mencakup kesehatan dan pendidikan. Kebijakan dalam pendidikan ditetapkan oleh pemerintah yang mengatur pengelolaan sekolah mencakup berbagai bidang garap seperti kurikulum, pedagogi, tenaga pendidik, hingga sarana prasarana yang ada di sekolah.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan yang didalamnya terdapat rencana-rencana konkret dimana rencana-rencana tersebut berpusat dari pemerintah yang akan dikelola oleh lembaga-lembaga yang akan menjalankan, seperti halnya kebijakan pendidikan. Setelah pemerintah mengedarkan suatu kebijakan dalam pendidikan, selanjutnya pihak sekolah atau yayasan berusaha menjalankan, mengelola, hingga mengombinasi kebijakan tersebut menjadi suatu keputusan yang menjadi pedoman dalam mobilitas kegiatan pendidikan.

## 2. Yayasan Nidaul Ishlah Banyumas

Yayasan Nidaul Ishlah Banyumas yang terletak di Jalan Gerilya Barat Gang IV Bojong Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan dibawah pimpinan ketua yayasan Arif Hidayatullah. Di bawah yayasan terdapat struktur jabatan yakni Lajnah Pendidikan dan Pembelajaran (LPP), Mudhir'Am (Direktur), Kepala Sekolah yang didalamnya menginduk dua pendidikan formal yakni Kelompok Belajar (KB) dan SD

---

<sup>10</sup> Andri Feriyanto dan Endang Shyta Triana, *Pengantar Manajemen*, (Kebumen: Media Tera), hlm. 4.

<sup>11</sup> Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan...*, hlm. 132.

Islam Terpadu Mutiara Hati Purwokerto. Keduanya masih berkumpul dalam satu wilayah yayasan agar memudahkan dalam kegiatan monitoring. Yayasan bermanhaj *salaf ahlus-sunnah waljamaah* yang ketat akan implementasi nilai-nilai Islam yang *Rahmatan lil 'alamin* sehingga ada beberapa perbedaan-perbedaan yang signifikan dengan sekolah-sekolah di bawah yayasan lainnya. Dikarenakan yayasan yang membawahi lembaga pendidikan, maka didalamnya terdapat kebijakan-kebijakan tertentu yang digunakan sebagai pedoman dalam mobilisasi kegiatan operasional pembelajaran. Penempatan ruang kelas, ruang guru, kamar mandi, hingga kantin dibuat secara terpisah tersendiri antara laki-laki dan perempuan. Bahkan di jenjang sekolah dasarnya, kepemimpinan kepala sekolah pun dipisah yakni ada kepala sekolah ikhwan dan kepala sekolah akhwat, walaupun dalam kacamata dinas hanya diberlakukan satu, namun dalam intern sekolah keduanya berperan penting sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru.

### 3. Pengertian Kurikulum

Kata “kurikulum” berasal dari bahasa Yunani yang semula digunakan dalam bidang olahraga, yaitu *currere* yang berarti jarak tempuh lari, sama halnya dengan jarak yang harus ditempuh oleh pelari dalam kegiatan berlari dari *start* hingga *finish*.<sup>12</sup> Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai pendidikan tertentu.<sup>13</sup> Dalam perkembangannya, kurikulum juga dapat diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi yang

---

<sup>12</sup> Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010), hlm. 1.

<sup>13</sup> Herry Widyastono, *Pengembangan Kurikulum di Era Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015) Cet. 2., hlm. 8.

dibakukan, serta cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah.<sup>14</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah mengenai kebijakan yayasan dalam penetapan kurikulum pendidikan bagi siswa di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut “Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Yayasan Nidaul Ishlah Dalam Penetapan Kurikulum Pendidikan Bagi Siswa SD Islam Terpadu (SDIT) Mutiara Hati Purwokerto?”

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan yayasan nidaul ishlah dalam penetapan kurikulum pendidikan bagi siswa SD Islam Terpadu (SDIT) Mutiara Hati Purwokerto.

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dalam dunia Pendidikan pada umumnya dan khususnya mengenai implementasi kebijakan yayasan nidaul ishlah dalam penetapan kurikulum pendidikan bagi siswa SD Islam Terpadu (SDIT) Mutiara Hati Purwokerto.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya dan memperkaya bahan pustaka di IAIN Purwokerto.

##### b. Manfaat Praktis

- 1) Secara praktis dari hasil penelitian yaitu untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai implementasi kebijakan

---

<sup>14</sup> Teguh Triwiyanto, *Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2015) Cet. 1., hlm. 7.

yayasan nidaul islah dalam penetapan kurikulum pendidikan bagi siswa SD Islam Terpadu (SDIT) Mutiara Hati Purwokerto.

- 2) Bagi sekolah, dapat memberikan gambaran, informasi dan masukan dalam rangka untuk pengambilan keputusan tentang program kurikulum yang telah diimplementasikan.
- 3) Bagi penulis, akan sangat bermanfaat dalam penambahan pengetahuan tentang implementasi kebijakan yayasan nidaul islah dalam penetapan kurikulum pendidikan Bagi siswa SD Islah Terpadu (SDIT) Mutiara Hati Purwokerto.

#### **E. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian yang telah ada, ditemukan beberapa karya ilmiah sebelumnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Kajian pustaka ini untuk menghindari kesamaan dan untuk menghindari plagiasi dengan penelitian lain yang sejenis diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi Umi Farchatul Janah yang berjudul “Manajemen Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di MA Darunnajat Pruwatan Bumiayu Tahun Pelajaran 2010/2011.” Hasil dari penelitian ini adalah dalam implementasi pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) diantaranya proses perencanaan pengembangan yang didalamnya terdapat pihak-pihak yang terlibat perencanaan antara lain Pengasuh Pondok Pesantren, Direktur KMI, Kepala Madrasah, Komite, Waka Kurikulum, Guru, dan seluruh karyawan yang ada dalam kepengurusan organisasi MA Darunnajat. Adapun Kepala Madrasah sebagai penanggung jawab dan melaksanakan prosedur sesuai visi misi dan tujuan pendidikan. Visi, misi, dan tujuan pendidikan dikomunikasikan dengan semua pihak yang berada dalam kepengurusan organisasi. Selanjutnya, kegiatan pengorganisasian pengembangan. Dalam tahap pengorganisasian disusun struktur kepengurusan berdasarkan *job description* yang dikomando oleh Waka Kurikulum. Ketiga, tahap pelaksanaan. Pelaksanaan pengembangan



KTSP dengan agenda seperti pembuatan kalender pendidikan, pembuatan jadwal mata pelajaran, perencanaan pembuatan soal. Dan tahap terakhir diadakannya proses evaluasi yang dilaksanakan oleh semua pengguna kurikulum.<sup>15</sup>

Penelitian ini letak persamaannya adalah membahas tentang lingkup kurikulum. Perbedaannya adalah lokasi penelitian, lokasi penelitian sebelumnya berlokasi di MA Darunnajat Pruwatan Bumiayu, sedangkan peneliti melakukan penelitian di salah satu lembaga pendidikan formal Yayasan Nidaul Ishlah yakni SD Islam Terpadu Mutiara Hati Purwokerto Kabupaten Banyumas. Fokus pembahasan, penelitian sebelumnya membahas tentang implementasi pengembangan KTSP, sedangkan peneliti fokus pada implementasi kebijakan yayasan dalam penetapan kurikulum pendidikan bagi siswa.

Kedua, skripsi Ratna Setiyowati yang berjudul “Implementasi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini di PAUD Roudlatul Jannah Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap.” Hasil penelitian ini adalah proses pelaksanaan kurikulum pendidikan anak usia dini di PAUD Roudlatul Jannah Cilacap menggunakan rujukan kurikulum diknas baru kemudian dikembangkan sendiri sesuai dengan Standar Pendidikan Anak Usia Dini dan Perkembangan anak, karena pada usia tersebut terjadilah pembentukan karakter atau sifat pada anak. Sebelum proses belajar mengajar dimulai maka diadakan diskusi pembahasan program-program yang akan diberikan pada anak didik, dan setiap guru dimintai untuk membuat satuan kegiatan harian yang digunakan dalam kegiatan mengajar, bukan hanya itu saja persiapan yang dibuat oleh guru juga membuat atau menyiapkan alat peraga yang akan digunakan. Sedangkan dalam pelaksanaan kurikulumnya, guru lebih sering menggunakan metode bernyanyi, metode bercerita, dan metode menyenangkan yang lainnya agar anak tidak merasa bosan dan tidak mudah

---

<sup>15</sup> Umi Farchatul Janah, *Manajemen Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di MA Darunnajat Pruwatan Bumiayu Tahun Pelajaran 2010/2011*, skripsi IAIN Purwokerto Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2011) hlm. 96-97.

merasa jenuh. Sedangkan untuk kegiatan evaluasi pada anak dengan melalui hasil tugas yang diberikan pada anak, hasil karya tersebut dibuat oleh anak, dengan cara menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru dengan cara tersebutlah guru dapat menilai dan mengukur perkembangan pada setiap anak.<sup>16</sup>

Penelitian ini letak persamaannya adalah membahas tentang ruang lingkup kurikulum. Perbedaannya adalah lokasi penelitian dan fokus penelitian. Penelitian sebelumnya berlokasi di PAUD Roudlatul Jannah Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap, sedangkan peneliti melakukan penelitian di salah satu lembaga pendidikan formal Yayasan Nidaul Ishlah yakni SD Islam Terpadu Mutiara Hati Purwokerto Kabupaten Banyumas. Fokus pembahasan, penelitian sebelumnya membahas tentang implementasi kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini, sedangkan peneliti fokus pada implementasi kebijakan yayasan dalam penetapan kurikulum pendidikan bagi siswa.

Ketiga, skripsi Eni Nurmareta yang berjudul “Implementasi Manajemen Kurikulum Mata Pelajaran pendidikan Agama Islam Kelas Akselerasi di SMP Negeri 01 Kroya Kabupaten Cilacap Tahun Pelajaran 2012/2013.” Hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi kurikulum mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dilakukan melalui beberapa tahap yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pertama adalah dilakukan perencanaan yang terlebih dahulu menganalisis kebutuhan yang diperlukan dan perkembangan siswa akselerasi dalam proses pembelajaran. Karena siswa CI/BI (cerads istimewa atau bakat istimewa) merupakan siswa yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan masa pendidikannya pun hanya berlangsung dua tahun saja maka dibuatlah kalender pendidikan secara mandiri yang sesuai dengan kebutuhan siswa akselerasi. Program akselerasi menggunakan kurikulum diferensial yang

---

<sup>16</sup> Ratna Setiyowati, *Implementasi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini di PAUD Roudlatul Jannah Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap*, skripsi IAIN Purwokerto Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2012) hlm. 100-101.

disusun dengan konsep sendiri yang dirumuskan oleh guru, kepala sekolah, dan tim akselerasi. Kedua, tahap pengorganisasian di mana guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam mengorganisasikan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam menggunakan desain *corelated curriculum* dimana mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dikaitkan dengan mata pelajaran yang lain yang berhubungan dengan pembatasan yang berarti terhadap mata pelajaran tersebut. Ketiga, tahap pelaksanaan yaitu di mana kurikulum yang digunakan adalah kurikulum diferensiasi yaitu diberlakukan proses penggemukan materi pada setiap mata pelajaran yang diajarkan. Terakhir, tahap pengawasan yaitu dengan dilakukan tes atau penilaian untuk mengetahui perkembangan siswa CI/BI dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.<sup>17</sup>

Penelitian ini letak persamaannya adalah membahas tentang kurikulum. Perbedaannya adalah lokasi penelitian dan fokus penelitian. Penelitian sebelumnya berlokasi di SMP Negeri 01 Kroya Kabupaten Cilacap, sedangkan peneliti melakukan penelitian di salah satu lembaga pendidikan formal Yayasan Nidaul Ishlah yakni SD Islam Terpadu Mutiara Hati Purwokerto Kabupaten Banyumas. Fokus pembahasan, penelitian sebelumnya membahas tentang implementasi kurikulum khusus mata pelajaran Pendidikan Agama Islam bagi siswa kelas akselerasi atau CI/BI, sedangkan peneliti fokus pada implementasi kebijakan yayasan dalam penetapan kurikulum pendidikan bagi siswa.

Keempat, jurnal karya ilmiah Imam Machali yang berjudul “Kebijakan Perubahan Kurikulum 2013 Dalam Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045.” Hasil karya ilmiah ini bahwasannya kebijakan perubahan kurikulum 2013 yang di dalamnya terdapat elemen-elemen perubahan dan implikasi perubahan kurikulum 2013 dalam sistem pembelajaran yang meliputi model pembelajaran, pendekatan, strategi, dan penilaian yang digunakan. Lebih

---

<sup>17</sup> Eni Nurmareta, *Implementasi Manajemen Kurikulum Mata Pelajaran pendidikan Agama Islam Kelas Akselerasi di SMP Negeri 01 Kroya Kabupaten Cilacap Tahun Pelajaran 2012/2013*, skripsi IAIN Purwokerto Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2013), hlm. 86-87.

lanjut lagi karya ilmiah ini mengungkapkan kebijakan kurikulum 2013 dalam rangka menyiapkan generasi yang produktif, kreatif, serta inovatif dan afektif pada 100 tahun Indonesia merdeka yaitu tahun 2045 yang sering disebut Indonesia Emas.<sup>18</sup>

Penelitian ini letak persamaannya adalah membahas tentang kebijakan kurikulum. Perbedaannya adalah objek dalam karya ilmiah tersebut dibahas dalam cakupan global atau umum tidak ada spesifikasi lokasi penelitian, sedangkan peneliti melakukan penelitian di salah satu lembaga pendidikan lembaga formal Yayasan Nidaul Ishlah yakni SD Islam Terpadu (SDIT) Mutiara Hati Purwokerto. Fokus pembahasan, karya ilmiah tersebut membahas tentang Kebijakan Perubahan Kurikulum 2013 dalam Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045, sedangkan peneliti fokus pada kebijakan yayasan dalam penetapan kurikulum pendidikan bagi siswa.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan yang sistematis dan memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap proposal penelitian ini, maka perlu disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bagian awal penelitian ini terdiri atas halaman judul, pernyataan keaslian, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, abstrak, halaman kata pengantar halaman daftar tabel, dan daftar isi.

Bab Satu berupa Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua berupa Landasan Teori mengenai Konsep Kebijakan yang terdiri dalam subbab yaitu Pengertian Kebijakan dan Kebijakan Pendidikan,

---

<sup>18</sup> Imam Machali, *Kebijakan Perubahan Kurikulum 2013 dalam Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 3, No. 1, Juni 2014/1435, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), DOI: 10. 14421/jpi.2014.31.71-94, hlm. 73. Diambil di [https://www.researchgate.net/publication/280902180\\_Kebijakan\\_Perubahan\\_Kurikulum\\_2013\\_dalam\\_Menyongsong\\_Indonesia\\_Emas\\_Tahun\\_2045](https://www.researchgate.net/publication/280902180_Kebijakan_Perubahan_Kurikulum_2013_dalam_Menyongsong_Indonesia_Emas_Tahun_2045) diakses pada tanggal, 3 Mei 2019, Jam 08:01 WIB.

Urgensi Kebijakan, Bentuk-Bentuk Kebijakan, Proses Pembuatan Kebijakan, dan Implementasi Kebijakan, Sedangkan Konsep Kurikulum yang terdiri dalam subbab yaitu Pengertian dan Fungsi Kurikulum, Teori-Teori Kurikulum, Ruang Lingkup Perubahan Kurikulum, Dasar Pengembangan Kurikulum, Manajemen Kurikulum, dan Evaluasi Kurikulum.

Bab Tiga berupa Metodologi Penelitian yang terdiri jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab Empat berisi tentang gambaran umum Yayasan Nidaul Ishlah dengan Spesifikasi merujuk pada salah satu lembaga pendidikan formal SD Islam Terpadu (SDIT) Mutiara Hati, penyajian data dan analisis data mengenai Implementasi Kebijakan Yayasan Dalam Penetapan Kurikulum Pendidikan Bagi Siswa.

Bab Lima berupa Penutup, yang berisi bagian terakhir dari skripsi ini yang berupa kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Bagian akhir, akan disertakan daftar pustaka, lampiran yang mendukung dan daftar riwayat hidup.

IAIN PURWOKERTO

## BAB II

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM PENETAPAN KURIKULUM

#### A. Konsep Kebijakan Pendidikan

##### 1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan menurut Kamus Oxford berarti rencana kegiatan atau pernyataan tujuan-tujuan ideal. Namun, dalam kehidupan sehari-hari kata kebijakan merupakan janji yang dibuat oleh kita sendiri.<sup>19</sup> Hakikat kebijakan yang sebenarnya berupa keputusan yang substansinya adalah tujuan, prinsip, dan aturan-aturan dengan format kebijakan yang biasanya dicatat dan dituliskan untuk dipedomani oleh pimpinan, staf, dan personel organisasi, serta interaksi dengan lingkungan eksternal.<sup>20</sup> Kebijakan yang selalu melekat dalam setiap pejabat dan penyelenggara negara dalam merespons setiap dampak dan permasalahan dalam penyelenggaraan negara disebut kebijakan publik.

Dalam kaitan dengan pengertian kebijakan publik, ada beberapa berbagai pendapat dari berbagai para ahli diantaranya William N. Dunn dikutip dalam buku karya Onisimus Amtu yang berjudul "*Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah*" mengartikan kebijakan publik adalah rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut pemerintahan seperti, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan rakyat dan lainnya.<sup>21</sup> Menurut Wahab, dikutip dalam skripsi Adelita Riantini yang berjudul "*Implementasi Kebijakan Kawasan Zona Pendidikan*" bahwa kebijakan sebagai tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu. Langkah-langkah yang telah/sedang diambil (atau gagal diambil) untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh

---

<sup>19</sup> Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan*,... hlm. 131.

<sup>20</sup> Syarifudin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 77.

<sup>21</sup> Onisimus Amtu, *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 208.

mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi). Istilah lain menyatakan bahwa, kebijakan sering diperlukan penggunaannya dengan tujuan, program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan rancangan besar.<sup>22</sup>

## 2. Pengertian Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik di bidang pendidikan. Pada penyelenggaraan negara, pendidikan dianggap sebagai salah satu bidang kebijakan publik. Jadi pendidikan bukan satu-satunya bidang yang berhubungan dengan kehidupan di masyarakat luas. Kebijakan meliputi berbagai bidang yang menyangkut kepentingan umum dan menjadi wewenang negara dan pemerintah untuk mengambil tindakan, keputusan dan menempuh kebijakan di dalamnya.

Dalam kaitan dengan pembahasan mengenai kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik, maka berikut ini dikemukakan beberapa prinsip antara lain *pertama*, nilai-nilai pendidikan harus mewarnai setiap kebijakan dalam berbagai bidang (ekonomi, sosial, politik, budaya, dll). *Kedua*, pendidikan harus terbebas dari intervensi kekuasaan dan konflik kepentingan. *Ketiga*, nilai-nilai pendidikan harus menjiwai sistem perpolitikan dan prinsip penyelenggaraan negara dan tata kelola pemerintahan. *Keempat*, nilai-nilai pendidikan harus menjadi spirit yang menjiwai kepribadian dan budaya bangsa yang menjunjung Bhineka Tunggal Ika. *Kelima*, pendidikan harus menjadi garda terdepan dari suatu proses perubahan dan menjadi lokomotif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Adelita Riantini, *Implementasi Kebijakan Kawasan Zona Pendidikan (Studi Kasus Kebijakan Kawasan Pendidikan di Jalan ZA. Pagar Alam, Gedong Meneng dan Rajabasa Bandar Lampung)*, skripsi Universitas Lampung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2016), hlm. 11-12.

<sup>23</sup> Onisimus Amtu, *Manajemen Pendidikan*,... hlm. 231-232.

Berikut aspek-aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan:

- a. Kebijakan merupakan suatu keseluruhan deliberasi atau kesepakatan suatu organisasi melalui hasil debat dan diskusi mengenai hakikat manusia sebagai makhluk yang menjadi manusia dalam lingkungan kemanusiaan.
- b. Kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praksis, yakni kesatuan antara teori dan praktik pendidikan.
- c. Kebijakan pendidikan haruslah mempunyai validitas dalam perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan itu.
- d. Kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan. Suatu kebijakan pendidikan bukanlah suatu yang abstrak tetapi dapat diimplementasikan untuk berbagai alternatif kebijakan sehingga perlu dilihat output dari kebijakan tersebut dalam praktik.
- e. Memiliki sifat keterbukaan. Proses pendidikan sebagai proses pemanusiaan terjadi dalam interaksi sosial. Hal ini berarti pendidikan merupakan milik masyarakat. Apabila pendidikan itu merupakan milik masyarakat maka suara rakyat dilibatkan dalam dalam berbagai tingkat perumusan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi kebijakan pendidikan.<sup>24</sup>

### 3. Urgensi Kebijakan

Adanya merupakan suatu kebutuhan bagi ilmuwan pendidikan, terutama di bidang administrasi dan manajemen pendidikan untuk memahami studi mengenai kebijakan publik khususnya kebijakan pendidikan. Kepentingan ini erat kaitannya dengan peran yang diharapkan dari ilmuwan administrasi dan manajemen pendidikan, tidak saja nantinya diharapkan sebagai seorang perumus kebijakan pendidikan yang berkualitas apabila dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan, tetapi lebih dari itu, mereka juga diharapkan akan memberikan peran yang besar dalam memberikan koreksi terhadap berbagai kesalahan atau ketidaktepatan dalam perumusan berbagai kebijakan pendidikan yang telah

---

<sup>24</sup> H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 141-142



dihasilkan oleh pemerintah selama ini. Suatu kebijakan diambil dan diputuskan biasanya dilatarbelakangi oleh adanya masalah. Masalah biasanya muncul ketika ada deskripsi antara dunia nyata dan dunia cita-cita. Sedangkan kebijakan pendidikan dilakukan dalam rangka mengurangi kesenjangan atau mendekatkan antara dunia cita-cita dengan dunia nyata.

Masalah pendidikan merupakan salah satu dari bidang pemerintahan yang sering dipandang sangat vital dan menentukan. Itulah sebabnya bidang pendidikan menjadi satu-satunya urusan pemerintahan yang plafon anggarannya ditentukan secara pasti dalam perundang-undangan, seperti yang termaktub dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Konsekuensinya, setiap pelaksana dan penyelenggara pendidikan berkewajiban untuk memahami dan melaksanakan kebijakan pendidikan sebagaimana mestinya. Kebijakan yang sesuai dan berpihak dalam upaya membangun pendidikan yang berkualitas dan prospektif sangat diperlukan, terutama ketika melihat bagaimana kondisi bangsa yang dialami selama ini, keadaan bangsa yang morat-marit dan sedang dalam keadaan sakit banyak tudingan negatif terhadap proses pendidikan yang dilaksanakan karena dianggap tidak mampu menghasilkan *output* yang baik dan berkualitas. Padahal sejajurnya untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tersebut banyak faktor penentu, salah satunya adalah kebijakan yang benar dalam pendidikan itu sendiri.<sup>25</sup>

#### 4. Bentuk-Bentuk Kebijakan

Riant Nugroho mengungkapkan bahwa kebijakan publik, termasuk di dalamnya adalah kebijakan pendidikan dapat dikelompokkan menjadi empat bentuk, yaitu:

##### a. Kebijakan Formal

Kebijakan formal merupakan berbagai keputusan yang dikodifikasikan secara tertulis dan disahkan atau diformalkan agar dapat berlaku. Kebijakan formal ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu

---

<sup>25</sup> H. M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*,... hlm. 41.

perundang-undangan, hukum, dan regulasi. Perundang-undangan adalah kebijakan publik berkenaan dengan usaha-usaha pembangunan *nation*, baik yang berkenaan dengan negara (*state*) maupun masyarakat (*society*). Berkenaan dengan pembangunan, itulah sebabnya perundang-undangan bersifat menggerakkan dan wajarnya perundang-undangan bersifat mendinamiskan, mengantisipasi, dan memberi ruang bagi inovasi.

Berdasarkan fakta tersebut, maka kebijakan publik termasuk kebijakan pendidikan itu sendiri dikelompokkan menjadi tiga, yaitu kebijakan publik dalam skala makro, meso, dan mikro. Sementara itu, hukum adalah aturan yang bersifat membatasi dan melarang. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban publik. Sedangkan bentuk ketiga dari kebijakan formal adalah regulasi. Regulasi berkenaan dengan alokasi aset dan kekuasaan negara oleh pemerintah sebagai wakil lembaga negara kepada pihak non-pemerintah.

b. Konvensi atau Kebiasaan atau Kesepakatan Umum (Kebijakan Non Formal)

Konvensi merupakan peraturan tak tertulis yang lama kelamaan menjadi suatu kelumrahan dan bahkan menjadi peraturan yang disepakati secara baik oleh suatu organisasi maupun masyarakat. Biasanya konvensi diturunkan dari generasi ke generasi berupa tradisi. Kebijakan dalam bentuk konvensi ini biasanya dibuat oleh suatu organisasi, baik itu organisasi internasional, nasional, maupun daerah. Konvensi biasanya dibuat melalui berbagai forum atau pertemuan resmi yang dihadiri oleh para pemimpin organisasi. Adapun ciri-ciri dari kebijakan konvensi adalah isi dan praktik dari konvensi dapat berjalan sejajar dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, timbul karena kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan secara berulang kali dalam penyelenggaraan suatu instansi, meskipun sifatnya tidak tertulis masyarakat tetap menerima kebijakan konvensi ini dan memandangnya sebagai aturan dalam penyelenggaraan yang harus dipatuhi.

Dalam penyelenggaraan pendidikan formal, selain kebijakan yang terdokumentasikan dalam bentuk Surat Keputusan seperti halnya perizinan pendirian sekolah, pelaksanaan program tertentu oleh pemerintah, juga terdapat kebijakan dimana kebijakan tersebut hanya melalui sebuah pertemuan-pertemuan yang di dalamnya merumuskan beberapa agenda perencanaan dan langsung dipraktikan apabila sudah mendapatkan hasil kesepakatan.

c. Pernyataan Pejabat Publik

Sedangkan bentuk ketiga dari kebijakan publik adalah pernyataan pejabat publik di depan publik ataupun pernyataan pejabat publik yang dipublikasikan di media massa. Pejabat publik yang dimaksud adalah pejabat legislatif, yudikatif, eksekutif, maupun pejabat akuntatif.

d. Perilaku Pejabat Publik

Hal ini dimulai dari gaya kepemimpinannya yang ditiru oleh bawahannya. *Gesture* pimpinan juga ditiru oleh bawahan. Selain itu sikap pimpinan ketika memimpin juga bukan hanya dapat ditiru oleh bawahannya tetapi juga oleh masyarakat. Itulah sebab perilaku apa yang dilakukan oleh pejabat publik dapat menjadi suatu kebijakan yang dapat menjadi seorang yang menirunya.<sup>26</sup>

5. Proses Pembuatan Kebijakan

Perumusan atau pembuatan kebijakan merupakan salah satu tahap yang penting dalam pembentukan kebijakan publik. Seperti yang ditulis oleh Charles Lindblom dan beberapa ahli yang lain, dalam memahami proses perumusan kebijakan kita perlu memahami aktor-aktor yang resmi maupun aktor yang tidak resmi.<sup>27</sup> Proses pembuatan kebijakan merupakan

---

<sup>26</sup> Novan Ardy Wiyani, *Kapita Selekta PAUD*, (Yogyakarta: Gava Media, 2016), hlm. 29-31.

<sup>27</sup> Antik Bintari, *Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 2 Oktober 2016, (Bandung: Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjajaran), ISSN: 2442-5958, E-ISSN:m2540-8647, hlm. 223. Diambil di <http://journal.unpad.ac.id/cosmogov/article/download/10006/pdf> diakses pada tanggal 6 Agustus 2019 pukul 18.26.

proses politik yang berlangsung dari tahap-tahap pembuatan kebijakan politik, dimana aktivitas politis ini dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan, dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung satu sama lainnya, diatur menurut aturan waktu, seperti: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan diakhiri dengan penilaian kebijakan. Dunn membuat rincian tahapan proses pembuatan kebijakan, seperti yang digambarkan pada tabel berikut:<sup>28</sup>

Tabel 1

Fase	Karakteristik
Penyusunan Agenda	Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama
Formulasi Kebijakan	Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif.
Adopsi Kebijakan	Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau keputusan peradilan.
Implementasi Kebijakan	Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.
Penilaian Kebijakan	Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi

<sup>28</sup> William N. Dunn, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000) (Terjemahan), hlm. 24.

	persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.
--	--

## 6. Implementasi Kebijakan

### a. Sekitar Implementasi Kebijakan Pendidikan

Pada dasarnya proses implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat menentukan sekaligus menegangkan. Proses ini menjadi penting disebabkan akhir dari semua kebijakan yang sudah diambil selalu pada tahap implementasi. Seandainya rumusan kebijakannya sudah dibuat sangat bagus namun tidak ada tindak lanjut berupa implementasi atas kebijakan yang sudah dirumuskan tersebut, merupakan usaha yang sia-sia dan tidak ada artinya. Sebagai tolak ukur keberhasilan kebijakan pendidikan adalah dapat dilihat pada bagaimana implementasinya. Rumusan kebijakan yang dibuat bukan hanya berhenti pada tataran rumusan, melainkan harus secara fungsional dilaksanakan.

Para ahli ilmu-ilmu sosial berpandangan bahwa proses implementasi kebijakan, termasuk hal ini pendidikan, berlangsung lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan perumusannya dikarenakan melibatkan perangkat politik sosial, hukum, administratif atau organisasi dalam rangkai mencapai suksesnya implementasi. Menurut Wibawa, implementasi kebijakan merupakan pengejawantahan keputusan mengenai keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga berupa instruksi-instruksi yang penting atau keputusan perundangan. Implementasi kebijakan merupakan salah satu komponen dalam proses kebijakan. Melaksanakan kebijakan berarti melaksanakan pilihan dari berbagai alternatif dalam perumusan dan perundangan yang berlaku, didukung oleh personil yang profesional, serta sarana dan prasarana yang tersedia secara layak.

Sebuah kebijakan sebelum dilaksanakan, perlu dijabarkan secara operasional seperti tujuan umum menjadi tujuan khusus yang lebih spesifik. Dalam penjabaran kebijakan itu, harus diatur sumber dana, sumber daya serta perangkat organisasi lainnya. Dalam konteks pelaksanaan kebijakan ini, Siagian mengemukakan bahwa perlunya perhatian terhadap hal-hal antara lain manusia, struktur, proses administrasi dan manajemen, dana, serta daya. Kesemua faktor tersebut dapat dijadikan sebagai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan.<sup>29</sup>

Kebijakan pendidikan dalam masalah implementasi kurikulum khususnya Kurikulum 2013 tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, baik menyangkut penyelenggaraan maupun *outputnya*. Bagaimanapun lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan pendidikan yang berkualitas memaksa pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis, salah satunya adalah dengan melakukan perubahan kurikulum di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan. Pada kurikulum 2013, pemerintah menetapkan standar nasional pendidikan, kerangka dasar, dan struktur kurikulum, silabus, serta pedoman implementasi kurikulum. Sedangkan setiap satuan pendidikan seperti halnya pada kurikulum 2006 yakni KTSP juga menyusun hal yang sama kecuali dokumen yang berupa silabus pada setiap mata pelajaran yang sudah disusun oleh pemerintah.<sup>30</sup>

Perubahan yang paling mendasar dalam aspek manajemen kurikulum, bahwa pendidikan harus mampu mengoptimalkan semua potensi kelembagaan yang ada dalam masyarakat, baik pada lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola pemerintah, masyarakat atau swasta. Adapun persyaratan dasar dalam kebijakan penetapan jenis kurikulum antara lain:

---

<sup>29</sup> H.M Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*,... hlm. 91.

<sup>30</sup> H.M Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*,... hlm. 169.

- 1) Kurikulum dikembangkan berdasarkan minat dan bakat peserta didik.
- 2) Kurikulum berkaitan dengan karakteristik potensi wilayah setempat, misalnya sumber daya alam, ekonomi, pariwisata, dan sosial budaya yang dikembangkan secara nyata sebagai dasar penguatan sektor usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- 3) Pembelajaran berorientasi pada peningkatan kompetensi untuk belajar dan bekerja, lebih bersifat aplikatif dan operasional.
- 4) Jenis keterampilan ditetapkan oleh pengelola program bersama-sama dengan peserta didik, orangtua, tokoh masyarakat, dan minta kerja dengan para *stakeholder* lainnya.<sup>31</sup>

b. Teori-Teori Implementasi Kebijakan Pendidikan

Pada dasarnya cukup banyak teori yang menjelaskan tentang implementasi kebijakan pendidikan. Menurut Wahab, paling tidak ada tiga teori yang cukup banyak dibahas dalam ranah ini yakni dijelaskan dibawah ini sebagai berikut:<sup>32</sup>

1) Teori Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn

Oleh para ahli ilmu politik keduanya dikelompokkan sebagai pencetus teori yang menggunakan pendekatan *he top down approach*. Menurut mereka, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna, maka dibutuhkan banyak syarat diantaranya:

- a) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang berarti.
- b) Untuk pelaksanaan suatu program, harus tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan harus benar-benar ada atau tersedia.

---

<sup>31</sup> H.M Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*,... hlm. 170.

<sup>32</sup> H.M Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*,... hlm. 96.

d) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.

2) Teori Van Meter dan Van Horn

Gagasan yang diawali dengan pengajuan pertanyaan mengapa ada implementasi yang gagal dan mengapa ada implementasi yang berhasil? Pertanyaan itu kemudian terjawab, bahwa ada enam variabel yang membentuk antara kebijakan dan kinerja kebijakan, diantaranya: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, interorganisasi, dan aktivitas pengukuhan, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta karakter pelaksana.

3) Teori Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut keduanya, ada beberapa variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal implementasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap untuk dikendalikan.
- b) Kemampuan dari keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya.
- c) Pengaruh lingkungan berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan.

4) Teori George C. Edwards III

George C. Edwards III mengemukakan bahwa salah satu pendekatan studi implementasi adalah harus dimulai dengan pernyataan abstrak seperti apa yang menjadi prasyarat bagi kebijakan dan apa yang menjadi faktor penghambat utama bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam pandangan Edwards III implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel



yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.<sup>33</sup>

a) Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut George C. Edward III adalah komunikasi. Komunikasi menurutnya lebih lanjut, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan di masyarakat.

b) Sumber Daya

Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Sumberdaya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.

c) Disposisi

---

<sup>33</sup> Ade Risna Sari dan Martoyo, *Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 di Kota Pontianak*, Jurnal Tesis Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura, (Pontianak: Universitas Tanjungpura Pontianak, 2014), hlm. 5.

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagi George C. Edward III adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak menjadi bias.

d) Struktur Birokrasi

Variabel keempat menurut George C. Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.<sup>34</sup>

c. Langkah-Langkah Implementasi Kebijakan Pendidikan

Tidak ada acuan baku tentang langkah-langkah implementasi kebijakan pendidikan. Namun apabila mengikuti alur berpikir sesuai

---

<sup>34</sup> Ibrahim, *Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Negeri 33 Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep*, skripsi Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2018), hlm. 27-29.

kerangka Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MEN-PAN) Nomor PER/04/M-PAN/4/2007 tentang pedoman umum formulasi, implementasi, evaluasi kinerja, dan revisi kebijakan publik di lingkungan lembaga pemerintah pusat dan daerah, langkah-langkah yang ditempuh dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- 1) Penyiapan implementasi kebijakan (0-6 Bulan), termasuk kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan para pihak yang menjadi pelaksana kebijakan pendidikan, baik dari kalangan pemerintah atau organisasi. Sosialisasi yang merupakan penyebaran informasi (program, peraturan, kebijakan) dari satu pihak ke pihak lain dan proses pemberdayaan, dimana diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kritis, menumbuhkan perubahan sikap sehingga kegiatan sosialisasi harus terintegrasi dalam aktivitas pemberdayaan dan harus dilakukan secara terus-menerus dan secara berkesinambungan.<sup>36</sup>
- 2) Implementasi kebijakan pendidikan dilaksanakan tanpa sanksi (masa uji coba) dengan jangka waktu 6-12 bulan dan dilanjutkan perbaikan atau penyempurnaan (validasi) kebijakan apabila diperlukan.
- 3) Implementasi kebijakan diberlakukan dengan sanksi dilakukan setelah masa uji coba selesai, disertai dengan pengawasan dan pengendalian.
- 4) Setelah dilakukan implementasi kebijakan dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi kebijakan.

#### d. Faktor Penentu Implementasi Kebijakan Pendidikan

Menurut Syukur, ada tiga unsur penting dalam implementasi kebijakan yang menjadi tolak ukur penentu keberhasilan kebijakan yakni, adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan, target group

---

<sup>35</sup> H.M Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*,... hlm. 100.

<sup>36</sup> Agustinus Hermino, *Manajemen Berbasis Sekolah di Daerah 3T dan Perbatasan Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 215.

yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau pelaksana dan unsur pelaksana baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Pakar kebijakan lainnya yakni William N. Dunn mengemukakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Policy Stakeholder*, yaitu para individu atau kelompok individu yang mempunyai andil dalam kebijakan.
- 2) *Policy Environment*, yaitu konteks khusus di mana kejadian-kejadian disekeliling isu kebijakan akan terjadi saling mempengaruhi oleh kebijakan publik.<sup>37</sup>

e. Kendala Keberhasilan Kebijakan Pendidikan

Kendala-kendala dalam implementasi kebijakan yang oleh Dunsire dinamakan sebagai *implementasi gap* yaitu suatu keadaan dalam proses kebijakan selalu terbuka untuk kemungkinan akan terjadinya perbedaan antara yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai.

Dalam kenyataannya, tipologi organisasi (tipe ideal) sering mengalami kesulitan dalam pewujudan, dan tidak jarang akan menghadapi kendala masalah di lapangan seperti berikut ini:

- 1) Dalam keadaan senyatanya, organisasi sering dihadapkan pada adanya perbedaan pandangan atau persepsi dalam melihat suatu masalah.
- 2) Suatu kebijakan sering telah mengatur bagaimana program tersebut dilaksanakan melalui juklak dan juknis.
- 3) Organisasi pelaksana tidak mempunyai mekanisme sistem komunikasi yang baik antar masing-masing organisasi.

---

<sup>37</sup> H.M Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*,... hlm. 104-105.

- 4) Suatu kebijakan dalam implementasinya mengalami masalah waktu (*time problem*) karena kelambatan komunikasi dan hilangnya momentum yang tepat dalam implementasi.
- 5) Masalah penyampaian informasi dalam pelaksanaan implementasi karena akumulasi kesalahan penyampaian informasi dari bawah keatas (*bottom up*).<sup>38</sup>

f. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Pada dasarnya monitoring dan evaluasi adalah kegiatan untuk melakukan penilaian terhadap implementasi kebijakan. Monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja suatu kebijakan. Sejauh mana kebijakan tersebut mencapai sasaran dan tujuannya. Monitoring diperlukan agar kesalahan-kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi resiko yang lebih besar. Evaluasi berguna untuk memberikan input bagi kebijakan yang akan datang supaya lebih baik.

1) Monitoring Kebijakan Pendidikan

Monitoring kebijakan adalah suatu proses pemantauan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan. Dengan demikian, fokus monitoring adalah pada pelaksanaan kebijakan pendidikan, bukan pada hasilnya. Dalam hal ini menyangkut komponen proses kebijakan pendidikan, baik proses pengambilan keputusan, proses kelembagaan, pengelolaan program, maupun proses belajar mengajar.<sup>39</sup> Pengawasan dilaksanakan dalam penyelenggaraan administrasi sekolah bukan hanya sekadar untuk mencari kesalahan atau kekurangan yang dilakukan oleh individu/personal, akan tetapi juga bermaksud membimbing dan

---

<sup>38</sup> H.M Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*,... hlm. 109.

<sup>39</sup> H.M Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*,... hlm. 109.

membantu kelancaran tugas personal itu ke arah yang lebih baik dan maksimal.<sup>40</sup>

## 2) Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Evaluasi merupakan tahap akhir dari sebuah proses kebijakan, merupakan penilaian mengenai apa yang telah terjadi sebagai akibat pilihan dan implementasi kebijakan, dan apabila dipandang perlu, dapat dilakukan perubahan terhadap kebijakan yang telah dilakukan. Menghasilkan evaluasi yang akurat bukanlah pekerjaan yang mudah, apabila untuk mengubah kebijakan bila ditemukan bila ditemukan kesalahan yang memerlukan perbaikan segera.<sup>41</sup>

## B. Konsep Kurikulum

### 1. Pengertian dan Fungsi Kurikulum

#### a. Pengertian Kurikulum

Kurikulum dalam bahasa Yunani berasal dari kata *curir* yang artinya *curere* yang artinya tempat berpacu. Konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori praktik pendidikan, juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianut. Hamalik menyatakan bahwa ada tujuh pandangan mengenai kurikulum yakni kurikulum sebagai suatu program kegiatan yang terencana, kurikulum sebagai hasil belajar, kurikulum sebagai reproduksi kultural, kurikulum sebagai kumpulan tugas dan distrik, kurikulum sebagai agenda rekonstruksi sosial, dan kurikulum sebagai *curere*.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman

---

<sup>40</sup> M. Hizbul Muflihah, *Adminstrasi Pendidikan*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2013), hlm. 128.

<sup>41</sup> H.M Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*,... hlm. 116.

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan nasional.<sup>42</sup>

Oemar Hamalik dalam jurnal Sri Rahayu dan Zuli Qodir berjudul *Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Pada Guru SMA di Kabupaten Kebumen*, bahwasannya kurikulum merupakan suatu alat pendidikan dengan tujuan untuk mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Kurikulum selalu menyediakan kesempatan-kesempatan yang luas bagi para peserta didik untuk mengalami berbagai macam proses pendidikan dan pembelajaran guna mencapai target tujuan pendidikan nasional khususnya dan sumberdaya manusia yang lebih berkualitas pada umumnya.<sup>43</sup>

#### b. Fungsi Kurikulum

Kurikulum memiliki berbagai fungsi. Diantaranya fungsi bagi guru, kepala sekolah, pengawas, orangtua dan juga bagi siswa. Berikut uraian fungsi kurikulum sebagai berikut.

- 1) Bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran.
- 2) Bagi kepala sekolah, kurikulum berfungsi untuk menyusun perencanaan dan program sekolah seperti penyusunan kalender sekolah, pengajuan sarana dan prasarana, dan berbagai penyusunan berbagai kegiatan di sekolah.
- 3) Bagi pengawas, kurikulum berfungsi sebagai panduan dalam melakukan supervisi ke sekolah.
- 4) Bagi orangtua siswa, kurikulum sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi penyelenggaraan program sekolah dan membantu putra-putrinya belajar di rumah sesuai dengan program sekolah.
- 5) Bagi siswa, kurikulum sebagai pedoman dalam kegiatan pembelajaran. Melalui kurikulum, siswa dapat memahami

---

<sup>42</sup> Teguh Triwiyanto, *Manajemen Kurikulum*,... hlm. 22.

<sup>43</sup> Sri Rahayu dan Zuli Qodir, *Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Pada Guru SMA di Kabupaten Kebumen*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 3 No. 3 Oktober 2016, (Yogyakarta: Magister Ilmu Pemerintahan, 2016), hlm. 473.

kompetensi apa yang harus dicapai, baik itu dalam bidang pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.<sup>44</sup>

## 2. Teori-Teori Kurikulum

Teori merupakan suatu perangkat pernyataan yang bertalian satu sama lain, yang disusun sedemikian rupa sehingga memberikan makna yang fungsional terhadap serangkaian kejadian. Menurut Bobbit, inti teori kurikulum yaitu kehidupan manusia. Kehidupan manusia meskipun berbeda-beda namun sejatinya tetaplah sama, terbentuk oleh sejumlah kecakapan pekerjaan. Pendidikan berupaya mempersiapkan kecakapan-kecakapan dengan teliti dan sempurna dan harus dikuasai untuk terjun dalam kehidupan yang bervariasi. Setiap tingkatan dan lingkungan kehidupan menuntut penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, kebiasaan, dan apresiasi tertentu.

Perkembangan teori kurikulum berikutnya dikemukakan oleh Hollis Caswel. Dalam peranannya sebagai ketua divisi pengembang kurikulum di beberapa negara di benua Amerika, ia mengembangkan konsep kurikulum yang berpusat pada masyarakat yang bersifat interaktif. Caswell menekankan pada partisipasi guru dalam menentukan isi kurikulum, struktur organisasi dari penyusunan kurikulum, dan mendesain kurikulum lebih rinci lagi agar lebih mudah dalam proses pengembangan ke tahap selanjutnya.<sup>45</sup>

Selanjutnya, perkembangan teori kurikulum oleh Thomas L. Faix yang menggunakan analisis struktural-fungsional yang berasal dari biologi, sosiologi, dan antropologi untuk menjelaskan konsep kurikulum, fungsi kurikulum dilukiskan sebagai proses bagaimana memelihara dan mengembangkan strukturnya. Ada sejumlah pertanyaan yang diajukan dalam analisis struktural-fungsional ini.

---

<sup>44</sup> Herry Widyastono, *Pengembangan Kurikulum*,... hlm. 9-10.

<sup>45</sup> Nur Ahid, *Konsep dan Teori Kurikulum dalam Dunia Pendidikan*, Jurnal Ilmu Pendidikan, Islamicca Vol. 1, No. 1 September 2006, hlm. 17. Diambil dari [https://www.researchgate.net/publication/286414734\\_Konsep\\_dan\\_Teori\\_Kurikulum\\_dalam\\_Dunia\\_Pendidikan/link/57a4a57c08ae455e85395b80/download](https://www.researchgate.net/publication/286414734_Konsep_dan_Teori_Kurikulum_dalam_Dunia_Pendidikan/link/57a4a57c08ae455e85395b80/download) diakses pada hari Kamis, 8 Agustus 2019 pukul 18.46.



Topik dan subtopik dari pertanyaan ini menunjukkan fonemena-fenomena kurikulum. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menyangkut pertanyaan umum mengenai fenomena kurikulum, sistem kurikulum, unit analisis kurikulum, fungsi sistem kurikulum, proses kurikulum, serta prosedur analisis struktural-fungsional.

### 3. Ruang Lingkup Perubahan Kurikulum

Pelaksanaan perubahan kurikulum 2006 (KTSP) menjadi kurikulum 2013 berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 2013, fokus utama utama perubahan kurikulum 2013 meliputi empat Standar Nasional Pendidikan, yaitu : Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian. Adapun pergeseran dari kurikulum 2006 ke kurikulum 2013 dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini.<sup>46</sup>

#### a. Pergeseran dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Tabel 2

No	Lama	Elemen Perubahan
1.	Terstruktur dalam: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SKL,</li> <li>• SK,</li> <li>• KD,</li> <li>• Indikator, pencapaian kompetensi</li> </ul>	Terstruktur dalam: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SKL,</li> <li>• Kompetensi Inti (KI)</li> <li>• Kompetensi Dasar</li> </ul> Kompetensi inti meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• KI-1: kompetensi inti sikap spiritual</li> <li>• KI-2: kompetensi inti sosial</li> <li>• KI-3: kompetensi inti pengetahuan</li> <li>• KI-4: kompetensi inti keterampilan</li> </ul>
2.	Lebih menitikberatkan pada pengembangan kompetensi dimensi	SKL: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menunjukkan</li> </ul>

<sup>46</sup> Martiyono, *Mengelola dan Mendampingi Implementasi Kurikulum 2013*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014), hlm. 7.

	kognitif	<p>perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki kemampuan pikir serta tindakan yang efektif dan kreatif.</li> <li>• Memiliki pengetahuan faktual dan konseptual yang berwawasan kemanusiaan, lingkungan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban.</li> <li>• Pembelajaran mengembangkan kemampuan fakta, konsep, prosedur, metakognitif.</li> </ul>
3.	SKL pada tiap mata pelajaran dikembangkan secara lepas	SKL dikembangkan menjadi kompetensi inti sebagai pengikat dan acuan bagi pengembangan kompetensi dasar.

## b. Pergeseran Dalam Standar Isi

Tabel 3

No	Lama	Elemen Perubahan
1	Kurikulum masih belum optimal memberikan peserta didik untuk mempelajari permasalahan di lingkungan masyarakatnya dan mengaplikasikannya	Kurikulum holistik dan integratif yang berfokus pada alam, sosial, dan budaya.

	dalam kehidupan sehari-hari	
2	Pembelajaran tematik di SD diberikan hanya di kelas rendah saja	Pendekatan pembelajaran tematik terpadu pada semua jenjang kelas.
3	Dalam pembelajaran siswa pada umumnya hanya menerima apa yang diberikan guru saja, sehingga daya inisiatif dan kreativitas berkarya tidak optimal	Pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, sehingga memiliki perilaku khas yang berkaitan dengan kebutuhan siswa pada hidupnya meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Domain sikap: menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan.</li> <li>• Domain pengetahuan: mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi.</li> <li>• Domain keterampilan: mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, mencipta.</li> </ul>
4	Jumlah mata pelajaran untuk SD sebanyak 10 mata pelajaran	Jumlah mata pelajaran dikurangi, tetapi jam pelajaran setiap mata pelajaran maupun keseluruhan ditambah. Kelas rendah sebanyak 6 mata pelajaran, sedangkan kelas tinggi sebanyak 8 mata pelajaran.
5	Jumlah mata pelajaran	Jumlah mata pelajaran

	SMP 12 mata pelajaran	SMP berjumlah 10 mata pelajaran.
6	Jam belajar SD untuk kelas rendah masing-masing 26,27,28 jam, dan untuk kelas tinggi masing-masing 32 jam pelajaran, dengan catatan boleh ditambah masing-masing 4 jam/minggu	Jam belajar SD untuk kelas rendah masing-masing 30,32,34 jam, dan untuk kelas tinggi masing-masing 36 jam pelajaran.
7	Pembelajaran di kelas masing-masing berdiri sendiri (parsial)	Khusus untuk mata pelajaran IPA, IPS di SMP pembelajaran terpadu menggunakan tema.
8	TIK merupakan salah satu mata pelajaran	TIK menjadi media semua mata pelajaran SMP.

c. Pergeseran dalam Standar Proses

Tabel 4

No	Lama	Elemen Perubahan
1	Pembelajaran berpusat pada guru. Guru ceramah dan siswa mendengar, menyimak, dan menulis	Pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa berinteraksi, berargumen, berdebat, dan berkolaborasi. Guru hanya sebagai fasilitator.
2	Pembelajaran satu arah, guru mengajari siswa	Pembelajaran interaktif (multi arah) siswa dengan guru, siswa dengan siswa, siswa dengan objek pembelajaran.
3	Pembelajaran menerapkan model isolasi, sebelumnya siswa bertanya kepada	Pembelajaran dalam konteks jejaring, siswa meimba ilmu

	guru, dan guru berguru pada buku yang ada di dalam kelas semata	dari berbagai sumber.
4	Pembelajaran disampaikan dengan cara verbal dan abstrak	Pembelajaran disampaikan dengan menggunakan contoh yang diperoleh dari hasil analisis.
5	Pembelajaran mengembangkan kapasitas tiap individu	Pembelajaran berbasis tim.
6	Proses pembelajaran menstimulasi indera penglihatan dan pendengaran.	Pembelajaran menstimulasi seluruh panca indera, komponen jasmani dan rohani terlibat aktif dalam kegiatan belajar.
7	Proses pembelajaran merujuk pada referensi yang dipilih guru	Pembelajaran merujuk pada buku guru dan siswa yang telah ditetapkan.
8	Pembelajaran bahasa Indonesia disetarakan dengan mata pelajaran lain	Pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks dan menjadi penghela mata pelajaran lainnya.

## d. Pergeseran dalam Standar Penilaian

Tabel 5

No	Lama	Elemen Perubahan
1	Penilaian dilakukan berorientasi pada hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian otentik mulai proses sampai hasil yang mencakup tiga aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</li> <li>• Pendekatan penilaian yang digunakan adalah</li> </ul>

		<p>Penilaian Acuan Kriteria (PAK).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian sikap meliputi observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik dan jurnal.</li> <li>• Penilaian pengetahuan meliputi tes tertulis, tes lisan dan penugasan.</li> <li>• Penilaian keterampilan tes praktik, proyek, dan portofolio.</li> </ul>
--	--	--

#### 4. Landasan Pengembangan Kurikulum

Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan. Sejalan dengan ketentuan tersebut, perlu ditambahkan bahwa pendidikan nasional harus berakar pada kebudayaan nasional, dan pendidikan nasional berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan ketentuan dan konsep-konsep tersebut, pengembangan kurikulum berlandaskan pada faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Tujuan filsafat dan pendidikan nasional yang dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan institusional yang pada gilirannya menjadi landasan dalam merumuskan tujuan kurikulum suatu satuan pendidikan.
- b. Sosial budaya dan agama yang berlaku dalam masyarakat.
- c. Perkembangan peserta didik, yang menunjuk pada karakteristiknya.

- d. Keadaan lingkungan, yang dalam arti luas meliputi lingkungan manusiawi, lingkungan kebudayaan termasuk iptek, dan lingkungan hidup, serta yang terakhir lingkungan alam.
- e. Kebutuhan pembangunan, yang mencakup diantaranya di bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, hukum, dan HAM.
- f. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan sistem nilai dan kemanusiaan serta budaya bangsa.<sup>47</sup>

## 5. Manajemen Kurikulum

Manajemen kurikulum berkenaan dengan bagaimana kurikulum dirancang atau direncanakan, diorganisasikan, diimplementasikan atau dilaksanakan dan dikendalikan (evaluasi dan penyempurnaan), oleh siapa, kapan, dalam lingkup mana, dan seterusnya. Manajemen kurikulum juga menyangkut kebijakan pada siapa yang diberi tugas, wewenang, dan tanggungjawab dalam merancang, melaksanakan, dan mengendalikan kurikulum.<sup>48</sup>

Berikut yang menjadi tahapan dalam manajemen kurikulum:

### a. Perencanaan Kurikulum

Secara umum perencanaan merupakan istilah yang sering dijumpai dalam disiplin ilmu manajemen, termasuk manajemen pendidikan. Usman menyatakan bahwa perencanaan adalah kegiatan yang dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Dari definisi tersebut, perencanaan mengandung unsur seperti sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, adanya proses, hasil yang ingin dicapai, dan menyangkut masa depan dalam waktu tertentu. Sedangkan perencanaan kurikulum merupakan perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan telah terjadi pada siswa. Dalam perencanaan kurikulum minimal ada lima hal yang mempengaruhi

---

<sup>47</sup> Oemar Hamalik, *Kurikulum dan...* hlm. 18-19.

<sup>48</sup> Herry Widyastono, *Pengembangan Kurikulum...* hlm. 48.

yaitu filosofi, materi, manajemen pembelajaran, pelatihan guru, dan sistem pembelajaran.<sup>49</sup>

b. Pengorganisasian Kurikulum

Pengorganisasian kurikulum adalah suatu proses ketika sekolah dapat mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan prioritas dari kebutuhan, dan mengembangkan keyakinan untuk berusaha memenuhi kebutuhan berdasarkan sumber daya yang tersedia yang ada dalam sekolah maupun dari luar sekolah dengan usaha secara kolektif. Seperti pengorganisasian pada bidang-bidang lainnya, dalam pengorganisasian kurikulum juga memerlukan pengorganisasian yang baik. Pengorganisasian kurikulum yang baik harus memenuhi:

- 1) Perumusan tujuan kurikulum yang jelas dan tepat
- 2) Perlunya pengelompokkan dan pembagian aspek-aspek pekerjaan secara jelas
- 3) Adanya kejelasan arah dan struktur kurikulum yang baik
- 4) Adanya kesinambungan pada setiap tahap atau jenjang kurikulum, serta
- 5) Kelenturan dalam pelaksanaan.<sup>50</sup>

c. Pelaksanaan Kurikulum

Pelaksanaan kurikulum merupakan perwujudan kurikulum yang masih bersifat dokumen tertulis menjadi aktual dalam serangkaian aktivitas pembelajaran. Perencanaan kurikulum tidak akan memberikan makna apa pun apabila perencanaan tersebut tidak diimplementasikan dalam program dan kegiatan. Menurut Sukmadinata, untuk melaksanakan kurikulum sesuai dengan perencanaan, dibutuhkan kesiapan, terutama kesiapan pada pelaksana. Apa pun desain atau perencanaan kurikulum yang dimiliki, keberhasilan sangat tergantung pada pelaksana, yaitu

---

<sup>49</sup> Teguh Triwiyanto, *Manajemen Kurikulum*,... hlm. 96.

<sup>50</sup> Teguh Triwiyanto, *Manajemen Kurikulum*,... hlm. 153.



guru.sumber daya pendidikan yang lain seperti sarana prasarana, biaya, organisasi, dan lingkungan, juga ikut serta menjadi kunci utama dalam keberhasilan pelaksanaan kurikulum.

## 6. Evaluasi Kurikulum

Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar. Masukan adalah segala sesuatu sumber daya yang diperlukan dalam sistem pendidikan untuk menciptakan hasil-hasil pendidikan. Proses adalah segala kegiatan kegiatan yang dilakukan untuk mengolah masukan pendidikan. Keluaran merupakan tingkat pencapaian hasil belajar, sikap atau tingkah laku, sedangkan hasil adalah keberhasilan studi selanjutnya.

Dalam konteks kurikulum, evaluasi kurikulum didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan realisasi masukan, proses, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar kurikulum. Evaluasi kurikulum berfungsi untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu kurikulum yang diterapkan pada pendidikan. Evaluasi kurikulum dilakukan dengan capaian tujuan yang ditetapkan. Evaluasi kurikulum dilakukan melalui beberapa prinsip berikut:

### a. Prinsip Relevansi

Artinya relevan antara pendidikan dan tuntutan kehidupan. Prinsip ini berkaitan dengan tiga segi yaitu, relevansi pendidikan dengan lingkungan peserta didik, relevansi perkembang di masa yang sekarang dengan masa yang akan datang, dan relevansi pendidikan dengan tuntutan dunia kerja.

### b. Prinsip Efektivitas

Artinya, sejauh mana sesuatu yang direncanakan atau diinginkan dapat terlaksana atau tercapai. Prinsip ini dapat ditinjau dari efektivitas mengajar guru dengan efektivitas belajar peserta didik.

c. Prinsip Efisiensi

Artinya, perbandingan antara hasil yang dicapai dan usaha yang telah dikeluarkan. Prinsip ini dapat ditinjau dari waktu, tenaga, peralatan, dan biaya.

d. Prinsip Kesenambungan

Artinya, saling hubung atau saling jalin-menjalin antara berbagai tingkatan jenis pendidikan dengan mempertimbangkan bahan ajar pada tingkat sekolah selanjutnya hendaknya sudah pernah diajarkan atau setidaknya disinggung pada tingkatan sebelumnya.

e. Prinsip Fleksibilitas

Artinya, ada ruang gerak yang memberikan kebebasan dalam berindak. Prinsip ini mencakup pada fleksibilitas peserta didik dalam memilih program pendidikan, serta fleksibilitas dalam mengembangkan program pembelajaran.<sup>51</sup>

Adapun prinsip-prinsip evaluasi atau penilaian kurikulum lainnya seperti yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 bahwa pelaksanaan evaluasi baik penilaian hasil belajar siswa yang dilakukan oleh guru, oleh satuan pendidikan, maupun pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.
- b. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
- c. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan siswa karena masalah khusus seperti latarbelakang agama, suku, budaya, status sosial maupun gender.
- d. Terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembelajaran.

---

<sup>51</sup> Teguh Triwiyanto, *Manajemen Kurikulum*,... hlm. 185

- e. Terbuka, berarti penilaian memiliki prosedur, kriteria serta dasar pengambilan keputusan dapat dilihat dari pihak yang berkepentingan.
- f. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai.
- g. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.<sup>52</sup>



IAIN PURWOKERTO

---

<sup>52</sup> E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum 2013 Revisi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018), hlm. 204.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian secara tercatat dan terperinci. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis dan menyajikan keadaan yang sebenarnya di lokasi penelitian yang merupakan penelitian bukan eksperimen, karena tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan,<sup>53</sup> sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.<sup>54</sup>

Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi serta aktivitas sosial lainnya.<sup>55</sup> Penelitian yang dimaksudkan pada jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.<sup>56</sup> Penelitian yang di dalamnya menjelaskan fenomena atau karakteristik individual, atau secara kelompok tertentu secara akurat, dengan kata lain penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan seperangkat peristiwa atau populasi kondisi saat ini.<sup>57</sup> Didalamnya berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan),

---

<sup>53</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 88.

<sup>54</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 6.

<sup>55</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 11.

<sup>56</sup> Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017) (Terjemahan), hlm. 4.

<sup>57</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 41.

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian jenis kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>58</sup> Menurut Bogdan dan Bikle penelitian kualitatif memiliki ciri sebagai berikut :

1. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci.
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau *outcome*.
4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.
5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna.<sup>59</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Yayasan Nidaul Ishlah yang terfokus pada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Mutiara Hati Purwokerto yang terletak di Jalan Gerilya Barat Gang IV Bojong Kelurahan Tanjung Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Yayasan Nidaul Ishlah dan SD Islam Terpadu (SDIT) Mutiara Hati Purwokerto berdiri sejak tahun 2009, di mana memungkinkan terdapat perubahan kebijakan kurikulum KTSP ke Kurikulum 2013.
- b. SD Islam Terpadu (SDIT) Mutiara Hati Purwokerto adalah bentuk pendidikan dasar yang menyelenggarakan program pendidikan berdasarkan kurikulum nasional yang kental dengan nilai-nilai Pendidikan Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.
- c. SD Islam Terpadu (SDIT) Mutiara Hati Purwokerto yang berfokus pada visi lembaga yakni Melahirkan Generasi Penghafal Al-Qur'an Berkarakter Rabbani sehingga menumbuhkan sikap cinta dan semangat belajar Al-Qur'an dan menjadi contoh teladan bagi lingkungan sekitarnya.

## **C. Subjek Penelitian**

<sup>58</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2017) Cet. 26., hlm. 9.

<sup>59</sup> Siswanto dan Suyanto, *Metode Penelitian Kombinasi Kualitatif dan Kuantitatif Pada Penelitian Tindakan (PTK dan PTS)*, (Klaten: 2016), hlm. 54.

Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian. Menurut Arikunto, subjek merupakan benda atau hal atau orang yang menjadi tempat data untuk variabel penelitian yang melekat dan yang dipermasalahkan.<sup>60</sup> Jadi, subjek penelitian yang dimaksud adalah beberapa orang atau informan yang nantinya dapat memberikan informasi-informasi yang peneliti butuhkan. Yang menjadi subjek penelitian adalah Ketua Yayasan Nidaul Ishlah, Ketua Lajnah Pendidikan dan Pembelajaran Yayasan Nidaul Ishlah Banyumas, Kepala SD Islam Terpadu Mutiara Hati, Kepala Tahfidzul Qur'an dan Kepala Biah Islamiyyah (adab) Tenaga Pendidik dan Peserta Didik.

#### 1. Ketua Yayasan

Ketua yayasan merupakan *centre* yang menjadi penentu dari seluruh kebijakan yang diputuskan. Ketua yayasanlah yang berhak mengakhiri keputusan yang ditawarkan dengan melakukan beberapa pertimbangan. Tanpa adanya keputusan akhir dari ketua maka kebijakan tidak dapat dijalankan seperti apa yang dikehendaki.

#### 2. Ketua Lajnah Pendidikan dan Pembelajaran (LPP) Yayasan Nidaul Ishlah Banyumas

Ketua LPP merupakan orang yang mendesain, merencanakan, dan membuat program dalam pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan untuk tingkat pendidikan formal yakni SD dan KB. Ustadz Naryo selaku ketua LPP di Yayasan Nidaul Banyumas, dimana beliau merupakan utusan yayasan untuk mengatur segala seluk beluk apa yang menjadi keputusan mengenai proses pembelajaran. Disini penulis akan memperoleh data tentang implementasi kebijakan dalam penetapan kurikulum pendidikan bagi siswa SDIT Mutiara Hati Purwokerto.

#### 3. Kepala SD Islam Terpadu Mutiara Hati Purwokerto

Kepala SD Islam Terpadu Mutiara Hati Purwokerto merupakan seseorang yang memegang kendali atas seluruh mobilitas yang diselenggarakan sekolah dan salah satu anggota tim manajemen yang ikut

---

<sup>60</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990) hlm. 116.

serta dalam merumuskan kebijakan yayasan. Ustadz Luthfi Arif sebagai Kepala SDIT Mutiara Hati, beliau yang menjadi utusan lanjutan dari pihak yayasan untuk menjadi pengambil keputusan segala sesuatu atau program-program yang akan dilaksanakan ditingkat SD.

#### 4. Kepala Tahfidzul Qur'an

Kepala Tahfidz disini berfungsi mengatur dan mendesain kurikulum khusus materi Tahfidzul Qur'an yang didampingi oleh LPP dalam merumuskan bahan ajar yang nantinya akan disampaikan kepada siswa. Disini Ustadz Wahyu Isnaeni bertindak sebagai kepala Tahfidzul Qur'an SDIT Mutiara Hati dengan timnya sebagai guru pengajar khusus pembelajaran Tahfidz.

#### 5. Kepala Biah Islamiyyah (Adab)

Tidak jauh berbeda dengan kepala Tahfidz, kepala Biah atau Adab sebagai salah satu orang yang berperan penting untuk mendesain materi-materi yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Ustadz Abdurahman bertindak sebagai Kepala Biah Islamiyyah (Adab) berkolaborasi dengan guru wali kelas untuk menyampaikan pengajaran materi adab kepada siswa-siswi SDIT Mutiara Hati.

#### 6. Tenaga Pendidik (Guru)

Guru menjadi faktor utama dalam keberhasilan pembelajaran kelas. Adanya desain kebijakan dari pihak yayasan, guru menjadi fasilitator yang juga terkena imbas atas kebijakan yang diberlakukan. Tugas guru yakni setiap minggunya mengajar selama 17 jam dan harus membuat rangkaian RKH (Rencana Kegiatan Harian) dan RKP (Rencana Kegiatan Pekan) yang ditujukan kepada siswa.

#### 7. Peserta Didik (Siswa)

Siswa menjadi sasaran utama dalam pembuktian keberhasilan proses pendidikan sekaligus yang menjadi dampak adanya kebijakan yang diturunkan oleh sekolah maupun yayasan.

#### D. Objek Penelitian

Objek dapat diartikan sasaran, bisa juga disebut sebagai variabel atau titik fokus permasalahan. Objek penelitian ini fokus pada implementasi kebijakan yayasan nidaul islah dalam penetapan kurikulum pendidikan bagi siswa SDIT Mutiara Hati Purwokerto.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

##### 1. Metode Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.<sup>61</sup> Pada penelitian ini, teknik wawancara akan dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan juga secara bertatap muka maupun menggunakan bantuan alat komunikasi. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi atau data mengenai kebijakan yayasan dalam penetapan kurikulum pendidikan bagi siswa. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara haruslah memiliki pedoman atau instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.<sup>62</sup> Sedangkan wawancara tidak terstruktur dilakukan secara bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.<sup>63</sup> Dalam metode ini penulis memperoleh data tentang implementasi kebijakan yayasan nidaul islah dalam penetapan kurikulum pendidikan bagi siswa SD Islam terpadu (SDIT) Mutiara Hati Purwokerto. Dengan metode wawancara diharapkan

---

114.

<sup>61</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2018) Edisi ke-3, hlm.

<sup>62</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 138.

<sup>63</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 140.



penulis dapat memperoleh jawaban sampai pada tingkat jenuh dari pertanyaan-pertanyaan yang sama.

Wawancara pertama, yaitu pada saat observasi pendahuluan yang dilaksanakan pada hari Senin, 11 Februari 2019 dengan Ustadz Budi selaku Mudhir 'Am (Direktur) yayasan Nidaul Ishlah Banyumas pada pukul 08.30 tentang seputar kurikulum yayasan dalam penulisan latar belakang proposal. kemudian, wawancara kedua dilaksanakan pada hari Senin, 20 Mei 2019 dengan Ustadz Naryo selaku Ketua Lajnah Pendidikan dan Pembelajaran (LPP) yayasan Nidaul Ishlah Banyumas pada pukul 10.30 tentang bentuk kebijakan yang digunakan yayasan. Selanjutnya, pada tanggal 29 Mei 2019 dengan Ustadz Naryo pada pukul 09.00 membahas tentang seputar program kurikulum. Wawancara keempat, pada hari Senin, 15 Juli 2019 dengan Ketua yayasan Nidaul Ishlah Banyumas Ustadz Arif Hiyatullah dan kepala SDIT Mutiara Hati Purwokerto Ustadz Luthfi Arif Ramdhani pada pukul 09.00 tentang sejarah berdirinya yayasan dan aspek-aspek manajemen dalam implementasi kebijakan kurikulum. Wawancara terakhir dilaksanakan pada hari Selasa, 30 Agustus 2019 dengan kepala Tahfidzul Qur'an Ustadz Wahyu Isnaeni, kepala Biah Ustadz Abdurahman, beberapa guru wali kelas Ustadz Ahmad dan Ustadzah Sindy Alwiansyah, dan tiga siswa kelas 3 dan 4 Akhwat yakni Ica, Sindy, dan Sofi.

## 2. Metode Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>64</sup> Jenis observasi yang akan peneliti gunakan yakni observasi partisipan dan observasi non partisipan. Dimana peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari dengan objek yang sedang diamati yakni keadaan guru dan siswa, serta mobilitas kegiatan belajar mengajar siswa yang di dalamnya menyangkut penerapan kebijakan penetapan kurikulum atau yang dibutuhkan sebagai sumber penelitian.

---

<sup>64</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 54.

Dengan observasi jenis keduanya ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumentasikan bisa dikatakan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen sejenisnya yang dibuat atau ditulis langsung oleh objek yang bersangkutan.<sup>65</sup> Pengumpulan data melalui dokumentasi adalah mencari data mengenai kebijakan penetapan kurikulum pendidikan seperti dokumentasi struktur kurikulum, kalender pendidikan, silabus maupun RPP serta hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, artikel, televisi dan sebagainya yang ada kaitannya dengan implementasi kebijakan yayasan nidaul ishlah dalam penetapan kurikulum bagi siswa SDIT Mutiara Hati Purwokerto.

## F. Teknik Analisis Data

Dalam proses analisis data, penulis menggunakan prosedur sebagai berikut :

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai artinya reduksi data dipakai untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak penting sehingga memberikan

---

<sup>65</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), hlm. 132.

kemudahan pada peneliti dalam menyusun kesimpulan.<sup>66</sup> Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan.<sup>67</sup> Oleh karena itu, jika peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak kenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam mereduksi data sehingga memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk menjawab masalah yang akan diteliti yakni implementasi kebijakan yayasan nidaul ishlah dalam penetapan kurikulum pendidikan bagi siswa SDIT Mutiara Hati Purwokerto.

## 2. Penyajian Data ( *Data display* )

Setelah data melakukan tahap reduksi, selanjutnya penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* maupun sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian ini, penyajian data akan disajikan dalam bentuk teks naratif untuk mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan yayasan nidaul ishlah dalam penetapan kurikulum bagi Siswa SDIT Mutiara Hati Purwokerto.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data direduksi dan di *display*, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yakni penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel, dalam hal ini maka penulis mengambil kesimpulan berdasarkan data yang

---

<sup>66</sup> Asep Kurniawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), Hlm. 241.

<sup>67</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*,... hlm. 249.

ada untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu “Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Yayasan Nidaul Ishlah Dalam Penetapan Kurikulum Pendidikan Bagi Siswa SD Islam Terpadu (SDIT) Mutiara Hati Purwokerto?”<sup>68</sup>



---

<sup>68</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*,... hlm. 251-252.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Yayasan Nidaul Ishlah dan SD Islam Terpadu (SDIT) Mutiara Hati Purwokerto**

##### **1. Sejarah Berdirinya Yayasan Nidaul Ishlah dan SDIT Mutiara Hati**

Yayasan Nidaul Ishlah Banyumas berdiri pada bulan Februari tahun 2008 dengan pemberian nama pada awalnya “Al-Ishlah”, dan setelah mengajukan permohonan izin pendirian yayasan sekitar pertengahan bulan Mei pada Kemekumham ternyata nama “Al-Ishlah” terlalu familiar dan sudah terpakai oleh yayasan lainnya maka nama “Al-Ishlah” tersebut dirubah menjadi Nidaul Ishlah. Yayasan yang mengawali program kariernya di bidang dakwah, kajian Islam, dan sosial yang pada akhirnya pada tahun 2009 yayasan memutuskan untuk merintis pendirian lembaga pendidikan formal yakni SD Islam Terpadu (SDIT) Mutiara Hati, dilanjutkan pada tahun 2010 yayasan mengklasifikasikan kembali lembaga pendidikan formal di dalamnya yakni pendirian KB Mutiara Hati. Secara dinas, keduanya mendapatkan izin berupa Surat Keputusan (SK) pendirian sekolah pada tahun 2013 dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan SK KEMENKUMHAM RI NO: AHU-6499.AHA.01.04 Tahun 2013 yang sebelumnya telah diresmikan secara legal dengan adanya surat Keputusan dari Ketua Yayasan Nidaul Ishlah Banyumas Nomor 01/SK/YNIB/VII/2009 tentang Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Hati Purwokerto.<sup>69</sup>

Dengan hiruk-pikuk perjuangan sebagai lembaga baru dan masih sangat minim fasilitas maupun SDM di dalamnya, yayasan memutuskan untuk menyewa rumah-rumah warga dan sebagian petak bangunan masjid yang kini masjid tersebut bernama Masjid Bhayangkara sebelah selatan Moro Purwokerto untuk mobilitas kegiatan pendidikan. Sekitar tahun 2013 terjadi pembebasan tanah waqaf yang sekarang dibangun menjadi gedung

---

<sup>69</sup> Dokumentasi SDIT Mutiara Hati Purwokerto Tanggal 29 Mei 2019.

sekolah SDIT Mutiara Hati dan KB Mutiara Hati Purwokerto yang beralamat di Jalan Gerilya Barat Gang IV Bojong Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan. Dengan yang pada awalnya bangunan masih bersifat seadanya dan terus mengalir bantuan-bantuan dari para donatur serta wali siswa yang sampai kini sudah menjadi bangunan sekolah yang layak dan dilengkapi berbagai fasilitas yang sudah memadai.<sup>70</sup>

Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi Jawa Tengah Nomor 044/SANSM-JTG/SK/X/2018 yang menyatakan bahwa sekolah yang bernama SDIT Mutiara Hati yang beralamat di Jlalan Gerilya Barat Gang IV Bojong Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 20362735 dinyatakan terakreditasi dengan mendapat nilai B (Baik) angka 89 dengan kualifikasi yakni Standar Isi dengan nilai 93, Standar Proses dengan nilai 79. Standar Kompetensi Lulusan dengan nilai 92, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan nilai 85, Standar Sarana dan Prasarana dengan nilai 88, Standar Pengelolaan dengan nilai 94, Standar Pembiayaan dengan nilai 93, dan Standar Penilaian Pendidikan dengan nilai 94.<sup>71</sup>

## 2. Visi, Misi, dan Tujuan

### a. Visi

“Melahirkan Generasi Penghafal AL-Qur’an yang Berkarakter Rabbani”.

Adapun indikator dalam pencapaian visi adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadi sekolah yang unggul dalam bidang akademik dan keagamaan.
- 2) Mencetak siswa-siswi yang mempunyai karakter sesuai dzat-dzat Allah yang tertuang dalam Asmaul Husna.

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Ustadz Arif Hidayatullah selaku ketua Yayasan Nidaul Ishlah Banyumas, pada tanggal 15 Juli 2019, pukul 09.00 WIB.

<sup>71</sup> Dokumentasi SDIT Mutiara Hati pada tanggal 30 Juli 2019.

- 3) Mencetak generasi yang beraqidah lurus, berakhlak karimah, dan menjadi pribadi yang sholih.

b. Misi

- 1) Menumbuhkan Semangat Gemar Membaca Al-Qur'an.
- 2) Menciptakan lingkungan islami dengan membiasakan adab-adab Islamiyyah.
- 3) Mengembangkan sistem pembelajaran yang menumbuhkan semangat mencintai ilmu.

c. Tujuan

- 1) Mencapai muslim yang multazim.
- 2) Menguasai dasar-dasar ilmu agama.
- 3) Menguasai dasar-dasar berbahasa Indonesia, Arab, dan Inggris yang baik dan benar.
- 4) Memiliki kemampuan menghafal minimal 3 juz Al Qur'an dan hadits-hadits shohih dengan mantap dan penuh percaya diri.
- 5) Menerapkan adab-adab Islam sehari-hari.
- 6) Memiliki dasar-dasar berpikir yang lurus.
- 7) Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>72</sup>

3. Target Mutu SDIT Mutiara Hati Purwokerto

a. Melaksanakan Thoharoh, Shalat dan Dzikir dengan Baik

Siswa-siswi SDIT Mutiara Hati setidaknya sejak dini sudah mulai ditanamkan nilai-nilai dasar keislaman mengenai tata cara bersuci, sholat wajib dan sunnah, serta cara-cara berdzikir dengan baik dan sesuai kaidah. Diantaranya, siswa diajarkan untuk melaksanakan wudlu secara tertib beserta doanya, mandi wajib yang tidak ditunda-tinda, melaksanakan sholat rawatib tepat waktu, melaksanakan sholat berjamaah wajib bagi siswa laki-laki, siap menjadi muazin dan imam bagi siswa laki-laki, melaksanakan dzikir dan doa setelah melaksanakan

---

<sup>72</sup> Dokumentasi SDIT Mutiara Hati Purwokerto pada tanggal 15 Juli 2019.

sholat, serta mengamalkan dzikir pagi hingga petang dan doa-doa harian.

b. Tadarus Al-Quran

Sebagaimana visi sekolah yakni “Melahirkan Generasi Penghafal Al-Qur’an Berkarakter Rabbani” maka kewajiban yang dilaksanakan dan harus diamalkan seluruh komponen SDIT Mutiara Hati Purwokerto khususnya bagi siswa-siswinya adalah mengawali pagi hari dengan *bermuroja’ah* ayat suci Al-Qur’an yang dibimbing oleh guru kelas, dan tadarus Al-Qur’an minimal setiap hari 1 halaman, kegiatan ini diupayakan untuk melatih siswa-siswi agar semakin dekat dan mencintai kalam Allah.

c. Berbakti kepada Orangtua

Berbakti kepada orangtua merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anak yang terlahir ke dunia. Wujud bakti diamalkan dengan kebiasaan-kebiasaan seperti diantaranya berpamitan ketika hendak pergi, berdoa untuk kebaikan orangtua, membantu pekerjaan rumah, memenuhi perintah orangtua, tidak membantah nasehat orangtua, peduli terhadap kondisi orangtua, berkata baik dan sopan santun kepada orangtua, serta berani meminta maaf dan mengakui kesalahan.

d. Memuliakan Guru

Setelah kedua orangtua, di sekolahpun terdapat wali pengganti peran orangtua di sekolah yakni guru. Sebagai siswa dan siswi, sudah seharusnya menghormati dan memuliakan guru. Menghormati dan menghargai guru dapat diwujudkan dengan memberi salam ketika bertemu, berlaku sopan dan bertutur santun kepada guru, taat kepada guru, serta mendengarkan nasehat-nasehat guru.

e. Menghargai Teman

Di sekolah selain guru, teman mempunyai peran yang sangat penting bagi tumbuh kembang siswa. Peran teman memberikan energi positif dan semangat dalam hal persaingan belajar hingga mengekspresikan



bakat melalui permainan. Diantaranya adab dalam berteman yang diterapkan di SDIT Mutiara Hati Purwokerto adalah menghargai perbedaan dan tidak mencela, berbicara dengan bahasa santun, peduli terhadap teman, serta terbiasa saling meminta maaf dan saling berterimakasih.

f. Kepedulian Lingkungan

Peduli dengan lingkungan merupakan cerminan seorang muslim, karena setiap kebersihan merupakan sebagian dari keimanan. Siswa-siwi SDIT Mutiara Hati mengaplikasikan sikap peduli dan cinta terhadap lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya, merawat barang atau fasilitas sekolah, serta menjaga kenyamanan untuk setiap penikmat fasilitas yang ada di sekolah.

g. Kemandirian

Kemandirian merupakan pelatihan terhadap anak untuk lebih memberi kesempatan pada diri sendiri agar lebih berani dan tidak menggantungkan hidupnya secara berlebihan kepada orang lain. Perwujudan kemandirian yang ditanamkan SDIT Mutiara Hati Purwokerto yakni siswa-siswi menjaga barang milik sendiri, merawat diri sendiri dengan menjaga kesehatan kerapihan dan kebersihan badan, berpakaian sesuai syariat, serta memiliki kesadaran belajar secara mandiri.

h. Keterampilan komunikasi

Komunikasi merupakan jembatan penghubung antar seseorang dengan orang yang lainnnya. Pentingnya komunikasi melatih seseorang untuk menyampaikan apa yang ada dalam pemikirannya. Siswa-siswi SDIT Mutiara Hati Purwokerto dilatih untuk bagaimana mereka berkomunikasi dengan baik diantaranya melalui mampu berpidato di depan kelas, mampu mengajukan pertanyaan kepada guru dan menyampaikan gagasan dengan efektif.

i. Bersikap Diri yang Baik

Bersikap diri yang baik diaplikasikan dengan menumbuhkan rasa disiplin, tanggungjawab, jujur, percaya diri, cekatan, tabah, serta memiliki jiwa wirausaha.

j. Memiliki keterampilan belajar

Disamping kemampuan untuk membaca dan menghafal Al-Qur'an, siswa-siswi SDIT Mutiara Hati Purwokerto dilatih untuk terampil dalam hal belajar. Keterampilan dalam belajar diaplikasikan dengan cara diantaranya lancar dan gemar membaca, mampu membuat *mind mapping*, serta gemar membaca minimal 2 buku non mapel per semester.

k. Mampu Berbahasa Arab

Kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa Arab diterapkan oleh SDIT Mutiara Hati Purwokerto kepada siswa-siswinya dengan hal-hal mendasar seperti mampu mempernalkan diri sendiri menggunakan bahasa Arab, mampu berdialog singkat dalam bahasa Arab, serta mengamalkan sebagian kosakata bahasa Arab yang dapat digunakan setiap hari.

l. Mampu Berbahasa Inggris

Selain berbahasa Arab, siswa-siswi SDIT juga dilatih untuk mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Pengaplikasiannya diwujudkan dengan mampu berdialog singkat dalam bahasa Inggris, mampu berpidato menggunakan bahasa Inggris tanpa teks setidaknya selama kurang lebih 5 menit.

m. Menguasai Komputer

Ilmu pengetahuan dan Teknologi sangat berkembang pesat di Indonesia. Adanya IPTEK mempermudah seseorang untuk melakukan pekerjaannya. Di SDIT Mutiara Hati Purwokerto, setidaknya siswa-siswi dikenalkan aplikasi *software* seperti Microsoft Word, Excel, dan Powerpoint, serta dilatih cara menggunakan internet sesuai rambu-rambu yang dibenarkan dan tidak mengganggu kegiatan belajar.

n. Memiliki wawasan global

Sebelum memulai mata pelajaran, guru SDIT Mutiara Hati setidaknya memberikan muqodimah mengenai pengetahuan umum dan keislaman yang bertujuan untuk membuka wawasan global untuk siswa-siswinya dengan mengenalkan kota-kota besar di dunia, mengenalkan tokoh-tokoh Islam di dunia, serta mengenalkan sejarah-sejarah Islam di dunia.<sup>73</sup>

4. Struktur Organisasi

Saat ini yayasan Nidaul Ishlah dipimpin oleh ketua yayasan bernama Ustadz Arif Hidayatullah. Dibawah pimpinan ketua yayasan terdapat ketua Lajnah Pendidikan dan Pembelajaran yakni Ustadz Naryo, S.Pd. yang berwenang sebagai konseptor kurikulum dan pembelajaran SDIT Mutiara Hati dan KB Mutiara Hati. Dibawah ketua LPP, terdapat Mudhir 'Am atau direktur SDIT Mutiara Hati yakni Ustadz Budi Setiawan, S.H.I. yang memberi komando berkolaborasi dengan ketua LPP kepada kepala sekolah. Kepimpinan Kepala SDIT Mutiara Hati Purwokerto terbagi menjadi dua yakni Kepala Ikhwan yakni Ustadz Luthfi Arif Ramdhani, S.Pd. dan Kepala Akhwat yakni Ustadzah Enggal Bintarum W, S.Pd. berdampingan dengan kepala bidang-bidang seperti kepala Tahfidzul Qur'an yakni Ustadz Wahyu Isnaeni, dan kepala Adab Islamiyyah yakni Ustadz Abdurrohman Hidayat, S.Pd. dibawahnya terdapat wali-wali kelas dari 12 rombongan kelas yakni, kelas 1A Ustadzah Ossy Lusiana Rofah, S.Pd., kelas 1B Ustadzah Weni Ariyanti, S.Pd., kelas 2A Ustadz Ismail, S.Pt., kelas 2B Ustadzah Siwi Hariani, S.Pd., kelas 3A Ustadz Ahmad Waluyo, S.Pd., kelas 3B Ustadzah Siti Khotimah, S.Pd., kelas 4A Ustadz Bayu Eko Wibowo, S.Pd., kelas 4B Ustadzah Sindy Alwiansyah, S.Pd., kelas 5A Ustadz Mohammad Fajar DP, S.Pd., kelas 5B Ustadzah Wiwik Setyaningsih, S.P., kelas 6A

---

<sup>73</sup> Dokumentasi SDIT Mutiara Hati Purwokerto pada tanggal 29 Mei 2019.

Ustadzah Januar Arief Saefudin, S. Pd., dan kelas 6B Ustadzah Intan Mahardika Sari Dewi, S. Pd.<sup>74</sup>

#### 5. Keadaan Sumber Daya Manusia SDIT Mutiara Hati Purwokerto

Jumlah tenaga pendidik atau guru berjumlah 41 orang yang dari keseluruhan merupakan guru berstatus non PNS. Adapun jumlah karyawan di SDIT Mutiara Hati Purwokerto berjumlah 6 orang dengan spesifikasi 4 orang karyawan Tata Usaha dan 2 orang sebagai OB (*office boy*). Jumlah siswi-siswi pada tahun ajaran 2018-2019 sebanyak 267 yang terdiri dari 12 rombongan belajar antar siswa laki-laki dan perempuan.<sup>75</sup>

#### 6. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sebagai fasilitas yang sangat diperlukan guna menunjang kegiatan mobilisasi yang ada disekolah dan menunjang proses pembelajaran untuk mencapai hasil yang maksimal. Adapun rincian sarana prasarana yang ada di SDIT Mutiara Hati yakni 12 ruang kelas yang terbagi menjadi 6 ruang kelas ikhwan dan 6 ruang kelas akhwat, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang kantin yang dibagi menjadi dua (ikhwan dan akhwat), 9 ruang kamar mandi/WC, 1 ruang gudang untuk keperluan penyimpanan barang, 1 masjid sekolah, 4 buah almari besar, 6 rak sepatu, 41 meja dan kursi guru, 267 meja dan kursi siswa, 15 buah *whiteboard*, 15 buah jam dinding, 8 buah komputer, 4 buah printer, peralatan olahraga (bola, net, tongkat, dll), halaman seluas 20x16 meter, serta parkir sepeda motor dan kendaraan roda empat.<sup>76</sup>

#### 7. Prestasi Siswa SDIT Mutiara Hati

SDIT Mutiara Hati Purwokerto merupakan sekolah yang mengedepankan pengajaran Al-Qur'an dan adab selain pada pembelajaran akademiknya. Walaupun sekolah tidak terlalu memfokuskan siswa-siswinya untuk berperan serta mengikuti perlombaan, tapi setidaknya dalam lima tahun terakhir berhasil menjuarai beberapa perlombaan dengan kualifikasi diantaranya, pada tahun 2014 mendapatkan juara I lomba

<sup>74</sup> Dokumentasi SDIT Mutiara Hati Purwokerto pada tanggal 30 Juli 2019.

<sup>75</sup> Dokumentasi SDIT Mutiara Hati Purwokerto pada tanggal 30 Juli 2019.

<sup>76</sup> Dokumentasi SDIT Mutiara Hati Purwokerto pada tanggal 30 Juli 2019.

festival cipta puisi tingkat SD se UPK Purwokerto Selatan dan juara III festival kriya anyam tingkat SD se UPK Purwokerto Selatan. Pada tahun 2015 mendapatkan juara cerdas cermat umum tingkat SD se UPK Purwokerto Selatan. Pada tahun 2016 mendapatkan juara II lomba MAPSI kategori adzan putra tingkat SD se UPK Purwokerto Selatan, dan pada tahun 2018 mendapatkan juara I lomba MAPSI untuk kategori lomba Hifdzil Qur'an untuk Putra dan Putri.<sup>77</sup>

## **B. Penyajian Data**

Kebijakan dalam penetapan kurikulum pendidikan bagi siswa merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh lembaga yang di dalamnya terdapat kegiatan pendidikan formal, baik terpusat langsung dari pemerintah maupun dibawah naungan yayasan. Kurikulum menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang memberikan makna bahwa di dalam kurikulum terdapat panduan interaksi antar guru dan siswa. Dengan demikian kurikulum bersifat sangat krusial dan berfungsi sebagai “jantung” dari proses pendidikan di sekolah untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi yang dimiliki siswa.<sup>78</sup>

Berbicara mengenai beragamnya penyelenggaraan pendidikan formal di Indonesia, baik yang terpusat oleh kebijakan pemerintah maupun kebijakan suatu yayasan, keduanya memiliki versi tersendiri dalam mengembangkannya. Sekolah yang terpusat oleh kebijakan pemerintah (negeri) mutlak mengikuti keseluruhan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan sekolah yang terpusat oleh yayasan didalamnya harus memiliki unsur khas yang menjadi ciri khusus pembeda dengan sekolah lainnya, walaupun sejatinya masih tetap merujuk pada kebijakan pemerintah.

Adanya kebijakan dari pemerintah yang dituangkan kedalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang penetapan kurikulum 2013 untuk jenjang Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah menjadi rujukan atau dasar kebijakan Yayasan Nidaul

---

<sup>77</sup> Dokumentasi SDIT Mutiara Hati Purwokerto pada tanggal 5 Agustus 2019.

<sup>78</sup> Teguh Triwiyanto, *Manajemen Kurikulum*,... hlm. 7.

Ishlah Banyumas dalam penetapan kurikulum bagi siswa SDIT Mutiara Hati Purwokerto, serta kebijakan berupa penetapan kurikulum khas sekolah yakni Kurikulum Pendidikan Karakter Berbasis Fitrah yang berbentuk kebijakan non formal tanpa terdokumentasikan berupa Surat Keputusan dan disepakati melalui konvensi atau musyawarah umum bersama para aktor kebijakan yayasan.

Implementasi kebijakan yayasan nidaul ishlah dalam penetapan kurikulum pendidikan bagi siswa SDIT Mutiara Hati Purwokerto yang terbagi menjadi lima tahap walaupun tidak ada acuan baku tentang langkah-langkah implementasi kebijakan pendidikan. Namun apabila mengikuti alur berpikir sesuai kerangka Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MEN-PAN) Nomor PER/04/M-PAN/4/2007 dalam buku H.M Hasbullah berjudul “*Kebijakan Pendidikan*” tentang pedoman umum formulasi, implementasi, evaluasi kinerja, dan revisi kebijakan publik di lingkungan lembaga pemerintah pusat dan daerah, langkah-langkah yang ditempuh dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan adalah sebagai berikut:

### **1. Sosialisasi dan Uji Coba Kebijakan**

Tahap ini merupakan tahap persiapan sebelum kebijakan diimplementasikan. Tahap yang melibatkan beberapa pelaku pembuat kebijakan (tim manajemen) yang nantinya akan berdampak kepada penerima kebijakan (siswa) dan tentunya oleh implementator kebijakan (guru). Oleh karena itu diperlukan penyebarluasan informasi secara akurat agar pihak-pihak yang terlibat dapat memahami isi-isi dari program kebijakan yang akan dilaksanakan. Sebelum pada tahapan sosialisasi dan uji coba, persiapan yang dilakukan antara lain:

#### **a. Perencanaan Kebijakan**

Membuat perencanaan kebijakan sangatlah diperlukan. Yayasan Nidaul Ishlah Banyumas didalamnya terdapat Lajnah Pendidikan dan Pembelajaran yang menjadi aktor utama dalam menentukan seluruh kebijakan yang berkaitan dengan pembuatan rancangan-rancangan

kurikulum sehingga lebih terarah dan terstruktur dengan baik. Seperti yang dijelaskan oleh Ketua LPP Yayasan Nidaul Ishlah sebagai berikut:

“secara struktur, kami benar-benar penguatan di LPP. Jadi LPP bisa dikatakan sebagai menteri pendidikannya yayasan, LPP lah yang membuat kurikulum, merancang kurikulum, dan membuat konsep secara keseluruhan setelah itu disetujui oleh ketua yayasan kemudian diserahkan kepada pihak sekolah, jadi sekolah tidak perlu terlalu banyak memikirkan konsep. Tugas kepala sekolah melaksanakan apa yang diperintah oleh LPP, dan tugas para guru mengajarkan apa yang dibuat oleh LPP.”<sup>79</sup>

Adanya dua jenis kebijakan kurikulum yang digunakan di SDIT Mutiara Hati Purwokerto yakni kurikulum pemerintah atau 2013 berbasis tematik dan kurikulum khas yayasan yakni kurikulum pendidikan karakter berbasis fitrah yang memuat tiga pilar pendidikan yaitu Tahfidzul Qur'an, Biah Islamiyyah, serta Pembelajaran Inti yang merupakan pilar umum yang menjadi kebijakan pemerintah yang dikembangkan oleh pihak sekolah. Ada beberapa perbedaan yang memang menjadi ciri khas tersendiri pada SDIT Mutiara Hati Purwokerto dengan sekolah lain pada umumnya. Sekolah berlabel IT (Islam Terpadu) memang sangat kental dengan nilai-nilai Agama, dimulai dari pemisahan kelas antar laki-laki dan perempuan, lebih penguatan mata pelajaran Agama dan sebagainya. Namun ada beberapa perbedaan yang menjadi kebijakan yayasan nidaul ishlah yakni pemisahan antar kepemimpinan kepala sekolah (ikhwan dan akhwat), walaupun dalam kacamata dinas hanya diberlakukan satu. Fungsi adanya pembagian kepemimpinan ini adalah untuk memudahkan koordinasi antar kepala sekolah ikhwan dengan guru ikhwan dan siswa ikhwan, serta kepala akhwat dengan guru akhwat dan siswa akhwat mengingat adanya pemisahan ruangan yang terjadi antar laki-laki dan perempuan serta terbatasnya komunikasi antar lawan jenis.<sup>80</sup> Dari keseluruhan kebijakan tersebut, terdapat masing-masing perencanaan

---

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan Ketua LPP Yayasan Nidaul Ishlah, Ustadz Naryo pada tanggal 15 Juli 2019.

<sup>80</sup> Hasil Observasi SDIT Mutiara Hati Purwokerto pada tanggal 11 Februari 2019.

dari ketiga pilar yang menjadi kebijakan dalam penetapan kurikulum pendidikan yakni:

1) Membuat atau Menentukan Isi Materi

Materi merupakan bahan ajar yang akan disampaikan oleh guru kepada siswa. Dalam membuat isi materi harus berdasarkan standar yang telah ditetapkan dan berlandaskan kepada kemampuan belajar siswa. Beberapa isi materi telah disusun sedemikian rupa oleh pihak LPP yayasan beserta Penanggung Jawab mata pelajaran tertentu. Selain memuat mata pelajaran umum, terdapat dua pembelajaran khusus yakni pembelajaran Tahfidzul Qur'an dan Biah Islamiyyah yang keduanya memiliki struktur materi tersendiri. Secara garis besar, pembelajaran Tahfidzul Qur'an memiliki 6 tahapan yakni pembukaan, apersepsi, tahfidz, tahsin, tilawah, dan penutup. Selanjutnya pembelajaran adab-adab Islam memuat materi keseluruhan pengajaran adab dimulai dari pembiasaan-pembiasaan seperti mengucapkan salam, menghormati teman dan guru, serta menghafal doa-doa tertentu. Sedangkan pembelajaran inti memuat materi yang diturunkan langsung oleh pemerintah, dan pihak sekolah mengembangkan sesuai mandiri dan apa yang dibutuhkan.

2) Menentukan Guru Pembelajaran

Guru merupakan orang yang memiliki peranan penting dalam keberhasilan suatu proses pembelajaran, oleh karena itu sangatlah dibutuhkan guru yang memiliki kualifikasi dan kompetensi serta *skill* mengajar yang baik guna terciptanya keberhasilan dalam proses pembelajaran. Dikarenakan masih dikatakan sebagai lembaga pendidikan baru, SDIT Mutiara Hati mengalami istilah tambal sulam guru dalam proses pembelajaran. Setiap guru diposisikan sesuai kompetensinya masing-masing. Pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar, formasi guru sebagai guru kelas diwajibkan untuk mengetahui seluruh mata pelajaran. Guru yang hendak mengajar di SDIT Mutiara hati Purwokerto minimal harus menghafal 2 juz Al-Qur'an



dengan formasi penempatan sebagai guru kelas dan 4 juz hafalan Al-Qur'an dengan formasi penempatan sebagai guru Tahfidzul Qur'an, dan setidaknya menghafal minimal 20 hadist tentang akhlak yang baik.

### 3) Pengalokasian Dana dan Sumber Belajar

Pengalokasian dana dan sumber belajar yang terdiri dari sarana prasarana menjadi salah satu faktor terpenting dalam tercapainya proses pendidikan. Pihak sekolah wajib mengalokasikan dana dan sumber belajar untuk menentukan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. Dengan terpenuhinya dua hal tersebut maka dapat meningkatkan produktivitas pembelajaran sehingga kebijakan dalam penetapan kurikulum pendidikan dapat tercapai dengan maksimal. Alokasi dana yang didapatkan SDIT Mutiara Hati untuk menunjang kegiatan pembelajaran setiap tahunnya didapatkan melalui anggaran dana BOS, donatur wali siswa, dan SOP siswa setiap bulannya. Dengan adanya ketiga hal tersebut pihak sekolah dapat secara optimal memberikan fasilitas-fasilitas belajar dengan baik sehingga tercapainya keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar. Seperti yang disampaikan oleh Kepala SDIT Mutiara Hati sebagai berikut:

“untuk alokasi dana, kami ada bantuan dana dari BOS dan donatur wali siswa untuk kegiatan perbaikan-perbaikan fasilitas sedangkan sumber belajar yang gunakan di jenjang SD menggunakan modul tersendiri dan khusus mata pelajaran PAI disusun oleh tim yayasan dan sekolah.”<sup>81</sup>

#### b. Pengorganisasian Kebijakan

Tahap pengorganisasian merupakan tahap kedua setelah perencanaan. Pada tahap ini dilakukan penyusunan struktur organisasi

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan Kepala SDIT Mtiara Hati, Ustadz Luthfi Arif Ramdani pada tanggal 15 Juli 2019.

guna mempermudah dalam pembagian tugas dan wewenang. Yayasan Nidaul Ishlah Banyumas memiliki istilah “Tim Manajemen” yang berfungsi untuk ikut andil dalam setiap merumuskan kebijakan. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua LPP Yayasan Nidaul Ishlah Banyumas:

“kami mempunyai perkumpulan yang disebut “Tim Manajemen”. Tim manajemen inilah yang setiap minggunya mengadakan musyawarah dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang nantinya akan dilaksanakan.”<sup>82</sup>

Adapun tim manajemen yang dimiliki Yayasan Nidaul Ishlah Banyumas beserta wewenangnya adalah sebagai berikut:

1) Kepala Yayasan

Berwenang sebagai penentu akhir dan peng-ketok palu terhadap kebijakan yang telah disepakati dan akan dilaksanakan.

2) Ketua dan Pengurus LPP (Lajnah Pendidikan dan Pembelajaran)

Berwenang sebagai konseptor yang mendesain seluruh kurikulum dan pembelajaran. LPP merupakan tangan kanan yang diutus yayasan sebagai penanggungjawab di bidang pendidikan dan pembelajaran.

3) Pembina dan Pengawas

Berwenang sebagai pemberi masukan-masukan dan mengawasi setiap jalannya rapat koordinasi.

4) Mudhir ‘Am (Direktur)

Berwenang sebagai penampung masukan dari para guru yang bekerjasama dengan kepala sekolah yang kemudian diajukan pada yayasan guna mendapatkan perbaikan.

5) Kepala Sekolah

Berwenang sebagai penanggungjawab mobilitas kegiatan di sekolah dan menampung aspirasi dari para guru.

6) Kepala Tahfidzul Qur’an

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Ketua LPP Yayasan Nidaul Ishlah Banyumas, Ustadz Naryo pada tanggal 15 Juli 2019.

Berwenang sebagai konseptor dan mendesain pembelajaran tahfidz yang didampingi oleh ketua LPP dalam memutuskan komponen-komponen materi ajar yang akan disampaikan oleh siswa.

#### 7) Kepala Biah Islamiyyah

Berwenang sebagai konseptor dan mendesain pembelajaran akhlak dan adab islam yang didampingi oleh ketua LPP dalam memutuskan komponen-komponen materi ajar yang akan disampaikan oleh siswa.

Setelah dilakukan tahap persiapan yang dimulai dengan perencanaan-perencanaan hingga pembagian tugas dan wewenang yang sering disebut pengorganisasian kebijakan, selanjutnya dilaksanakanlah pada kegiatan sosialisasi kebijakan. Sosialisasi kebijakan dilakukan dengan mengadakan rapat dengan para guru sebagai upaya dari tindak lanjut setelah kebijakan dirumuskan. Rapat atau pertemuan yang dimaksudkan untuk penyebarluasan informasi mengenai hasil dari kebijakan yang telah disepakati oleh tim manajemen sebagai aktor dalam perumusan kebijakan. Mengingat pentingnya sosialisasi untuk menjelaskan lebih detail apa saja komponen-komponen yang harus diperhatikan, khususnya dalam hal kurikulum. Setelah guru sebagai implementator kebijakan menerima informasi mengenai isi kebijakan, maka selanjutnya guru sudah siap melaksanakan pada tahap uji coba kebijakan yang akan dilaksanakan kepada siswa dalam proses pembelajaran. Seperti yang disampaikan oleh kepala SDIT Mutiara Hati Purwokerto sebagai berikut:

“kami adakan rapat dengan para guru mba mengenai kurikulum apa saja yang menjadi kebijakan dari yayasan. Guru dibekali ilmu mengenai penjelasan-penjelasan tentang detailnya kurikulum 2013 seperti memperhatikan promes, dan cara membuat RKH (Rencana Kegiatan Harian) dan RKP (Rencana Kegiatan Pekan). Untuk guru mata pelajaran tahfidz juga dibekali cara atau metode penyampaian

menghafal Al-Qur'an sesuai kaidah tajwid, sehingga bisa ditiru oleh siswa dengan baik”<sup>83</sup>

## 2. Validasi Kebijakan (Perbaikan dan Penyempurnaan)

Setelah pelaksanaan tahap uji coba kebijakan, setidaknya yayasan menemukan beberapa kendala dan hal-hal yang membutuhkan upaya dalam penyempurnaan kebijakan. Pada tahap uji coba sebagaimana yang disampaikan oleh ketua LPP Yayasan Nidaul Ishlah Banyumas sebagai berikut:

“wah untuk percobaan selama 6 bulan setelah sosialisasi masih sangat jauh dari harapan mba. Masih sangat berantakan, sering terjadi *missed* komunikasi antar guru dan yayasan, guru masih belum begitu paham mengenai materi-materi dan komponen yang akan diajarkan kepada siswanya, sehingga banyak materi yang terkadang terlewat tidak diajarkan. Dari kami pihak LPP terus mengembangkan kurikulum agar guru mudah memahami dan menafsirkan sehingga dapat diterima oleh siswanya”.<sup>84</sup>

Ditemukannya kendala-kendala pada saat tahap pengujian cobaan kebijakan menjadikan pihak LPP harus berfikir kembali dalam mengupayakan perbaikan agar kebijakan lebih dapat mudah dipahami oleh guru sebagai implementator kebijakan. Diadakannya *workshop* menjadi alternatif dalam meminimalisir kendala-kendala yang terjadi. *Workshop* bertujuan untuk menyampaikan kembali secara detail mengenai apa itu kurikulum 2013, bagaimana cara penggunaannya, apa saja komponen di dalamnya, dan mengenai bagaimana guru dapat mengembangkan program semester menjadi ke dalam Rencana Kegiatan Harian (RKH) dan Rencana Kegiatan Pekan (RKP).

## 3. Implementasi Kebijakan

Tahap implementasi kebijakan atau tahap pelaksanaan merupakan suatu realisasi terhadap kebijakan yang sebelumnya sudah direncanakan, sudah melalui tahap uji coba, dan sudah mengalami perbaikan-perbaikan. Pada tahap ini, yayasan terutama pihak LPP berupaya lebih menggerakkan

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Kepala SDIT Mutiara hati Purwokerto, Ustadz Luthfi Arif Ramdani pada tanggal 15 Juli 2019.

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan Ketua LPP Yayasan Nidaul Ishlah Banyumas, Ustadz Naryo pada tanggal 15 Juli 2019.

kembali sumber daya manusia yang terlibat didalamnya dan memberdayakan kinerjanya dalam pelaksanaan implementasi kebijakan yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan siswa di SDIT Mutiara Hati Purwokerto.

Seperti halnya yang dilakukan oleh LPP Yayasan Nidaul Ishlah Banyumas sebagai penanggungjawab penuh terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan siswa. Bekerjasama dengan kepala sekolah dalam memandu pelaksanaan kebijakan yang diharapkan dapat terlaksana dengan sebaik mungkin. Adapun implementasi kebijakan dan prosedur umum yang dilaksanakan SDIT Mutiara Hati Purwokerto adalah sebagai berikut:

a. Keberangkatan Siswa

- 1) Jam masuk siswa adalah pukul 07.20 WIB
- 2) Penyambutan siswa oleh asatidzah adalah pukul 07.05-07.20 WIB dengan siswa membiasakan adab salam, sapa, dan senyum, meletakkan barang sesuai tempatnya, membersihkan dan merapikan diri dan tempat belajar, menyiram tanaman, serta memberi makan hewan piaraan yang ada disekitar sekolah (kelinci)
- 3) Program tetes embun pagi (ceramah pagi) bagi asatid asatidzah adalah pukul 06.50-07.05 WIB
- 4) Pelayanan TU dan pembayaran adalah setelah pukul 07.05 WIB

b. Dzikir Pagi

- 1) Dimulai pukul 07.20-07.40 WIB
- 2) Hari senin dilaksanakan di halaman sekolah dengan bentuk kegiatan upacara
- 3) Hari selasa sampai dengan hari kamis dilaksanakan di kelas masing-masing dengan rangkaian doa belajar dan dzikir ringan, motivasi pagi, absensi, jurnal pagi, *ice breaking*, persiapan mata pelajaran pertama

- 4) Hari jumat dilaksanakan di halaman sekolah dengan bentuk kegiatan dzikir pagi ringan, penyampaian kosa kata bahasa Arab, dan senam jasmani.
- c. Halaqah Tahfidzul Qur'an
- 1) Halaqah memperhatikan rasio siswa, satu halaqah dilakukan sekitar 12 siswa
  - 2) Target minimal adalah 3 juz mutqin
  - 3) Pemberian tugas rumah berupa murajaah hafalan pada akhir pekan dan liburan panjang
- d. Penerapan Adab Islami
- 1) Dengan pembiasaan adab-adab Islam dengan bimbingan guru pada rangkaian aktivitas siswa di sekolah dan bimbingan orangtua dari luar sekolah
  - 2) Implementasi adab akhlak dan ibadah dengan tema, pada setiap tema terdapat subtema dalam setiap pekannya
  - 3) Pemberian tugas rumah berupa penerapan akhlak-akhlak yang ditentukan oleh sekolah pada akhir sekolah dan libur panjang
- e. Tematik
- 1) Pelajaran umum menggunakan pendekatan tema
  - 2) Tematik dikemas dengan semenarik mungkin, menyenangkan, dan tidak membosankan
- f. Istirahat
- 1) Siswa membeli jajan di kantin yang sudah disediakan pihak sekolah dan tidak diizinkan jajan di luar area sekolah
  - 2) Siswa menerapkan adab mengantri, menjaga kebersihan, adab makan dan minum
  - 3) Siswa bermain di area sekolah
  - 4) Siswa memanfaatkan perpustakaan
- g. Makan Siang
- 1) Waktu ishoma adalah pukul 11.30-13.00 WIB

- 2) Waktu ishoma bergantian, siswa perempuan makan siang terlebih dahulu dan siswa laki-laki sholat berjamaah, selanjutnya bergantian
- 3) Siswa makan siang di kelas masing-masing di dampingi wali kelas
- 4) Siswa menerapkan adab makan dan minum

#### h. Sholat Dzuhur Berjamaah

- 1) Siswa dan siswi sholat dzuhur berjamaah secara bergantian, siswa laki-laki sholat berjamaah terlebih dahulu baru kemudian siswa perempuan
- 2) Pelaksanaan wudhu dengan bimbingan seluruh guru hingga memastikan benar dan tertib dalam berwudhu
- 3) Siswa menerapkan adab masuk dan keluar masjid dengan bimbingan guru
- 4) Pelaksanaan sholat dengan arahan dan bimbingan guru
- 5) Siswa menerapkan adab mendengar adzan, berdoa antara adzan dan iqamat, tenang di masjid dan mengerjakan sholat sunnah

#### i. Taudhi' (Kepulangan)

- 1) Persiapan pulang 15 menit sebelum jam kepulangan
- 2) Siswa membereskan segala peralatan belajar, tempat belajar dengan bimbingan guru wali kelas
- 3) Siswa memastikan lantai, meja, kursi, dan laci bersih dari sampah
- 4) Siswa berdoa, mengucapkan salam, dan bersalaman dengan guru.<sup>85</sup>

Adapun uraian pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum pendidikan bagi siswa SDIT Mutiara Hati Purwokerto adalah sebagai berikut:

---

<sup>85</sup> Dokumentasi SDIT Mutiara Hati Purwokerto pada tanggal 30 Juli 2019.

a. Pembelajaran Tahfidzul Qur'an

Secara garis besar pembelajaran tahfidz dibagi menjadi 6 tahapan yakni tahap pembukaan, apersepsi, pembelajaran inti, tahsin, tilawah, penutup, dan evaluasi.

1) Pembukaan

Pembukaan berisi salam, sapa, menanyakan kabar, mengabsen, dan berdoa.

2) Apersepsi

Apersepsi berisi tentang:

- a) Motivasi untuk anak-anak agar lebih bersemangat dalam menghafalkan Al-Qur'an. Dapat diisi dengan kisah-kisah penggugah hati tentang para penghafal Al-Qur'an dari kalangan para sahabat dan juga orang-orang shaleh
- b) Yel-yel penyemangat agar halaqah lebih hidup dan bersemangat
- c) Kontrak belajar supaya halaqahnya tetap rapi dan kondusif. Suasana tenang dan nyaman sangat mendukung dalam proses menghafal Al-Qur'an.

3) Pembelajaran inti Tahfidzul Qur'an

Masuk pembelajaran inti yakni hafalan. Sebelum memasuki hafalan, perlu diperhatikan bahwa metode belajar menghafal yang mengasyikkan sangat disukai anak-anak. Oleh karena itu, di SDIT Mutiara Hati metode menghafalnya menggunakan nada *rost* yaitu dengan metode nada turun naik. Disamping itu juga inovasi mengajar juga sangat diperlukan oleh pengajar agar tercipta kondisi tahfidz yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Sebelum masuk ke hafalan ada beberapa yang harus diperhatikan guru yakni:

- a) Merefresh (mengulang hafalan kemarin) agar hafalan yang telah berlalu tetap bersambung dan mudah di gabungkan dengan hafalan yang baru
- b) Mengecek satu persatu hafalan anak yang kemarin bisa dengan urutan tiap anaknya satu ayat atau dibuat berkelompok



- c) Metode menghafal di SDIT Mutiara Hati Purwokerto adalah dengan cara *Talaqqi* (menirukan gurunya). Anak-anak ditanamkan konsep menghafal dengan cara *talaqqi* dan juga pengulangan beberapa kali pengulangan. Harapannya, ketika sudah tertanam konsep seperti ini, akan melekat dan membekas dengan tujuan agar konsep seperti bisa diaplikasikan setiap hari di kehidupannya. Metode *talaqqi* di tanamkan kembali konsep di dalamnya dengan 3 tahapan proses menghafal yakni *Sabaq* (hafalan yang baru di hafal), *Sabqi* (hafalan yang di hafal kemarin), *Manzil* (hafalan yang telah lampau).
- d) Barulah mulai menghafal hafalan yang baru beberapa kali pengulangan bisa 5-8 kali, atau sesuai dengan kebutuhan.
- e) Kemudian anak diperintahkan untuk menirukan apa yang sudah di *talqin* oleh gurunya, hingga anak dapat menghafal dengan benar sesuai kaidah tajwid.

#### 4) Tahsin

Tahsin merupakan makna kata dari bahasa Arab yang artinya memperbaiki. Di SDIT Mutiara Hati Purwokerto tahsin dilakukan guna memperbaiki bacaan Al-Qur'an yang sudah dihafalkan. Ketika sudah terbiasa membaca dengan tartil, harapannya agar anak-anak dapat mengaplikasikannya di kehidupannya setiap hari hingga besar kelak.

#### 5) Tilawah

Di SDIT Mutiara Hati Purwokerto, tilawah menggunakan *iqro'* dari jilid 1 sampai 6 dengan metode membacanya menggunakan nada *ummi* yakni naik turun.

#### 6) Evaluasi

Evaluasi program tahfidz dilakukan setiap akhir pembelajaran usai. Evaluasi dilakukan dengan cara mengecek satu persatu tiap anak,

bisa juga berkelompok, tetapi akan lebih terlihat apabila dicek satu persatu, berkelompok hanya untuk variasi jika dibutuhkan.<sup>86</sup>

b. Pembelajaran Biah Islamiyyah (Adab-adab Islam)

Adab merupakan norma atau aturan mengenai sopan santun yang di dasarkan atas aturan Agama yakni sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kategori adab yang diajarkan SDIT Mutiara Hati terhadap siswa-siswinya adalah adab terhadap Allah dan Rasul-Nya, adab terhadap orangtua dan guru, adab terhadap diri sendiri, adab terhadap orang lain, adab terhadap alam. Implementasi pembelajaran adab termuat dalam pembelajaran tematik yang di dalamnya diselipkan pesan-pesan mengenai adab yang tersirat dalam tema yang diajarkan pada hari itu. Pembelajaran adab dilakukan dengan beberapa tahap yakni tahap sosialisasi. Pada tahap sosialisasi ini, wali kelas menyampaikan materi yang diajarkan pada siswanya berdasarkan tema dan subtema yang akan dilaksanakan. Yang kedua, tahap simulasi. Pada tahap ini guru mencotohkan berupa doa-doa ataupun makna-makna yang tersirat dalam tema pembelajaran. Yang ketiga, tahap implementasi. Tahap ini siswa mulai melaksanakan apa yang sebelumnya sudah disimulasikan oleh guru. Yang keempat yakni tahap evaluasi. Tahap ini guru mengecek satu persatu hafalan doa-doa mengenai adab yang telah diajarkan, dan mengamati pergerakan siswa dalam menerapkan adab yang sesungguhnya dalam tingkah laku setiap hari.<sup>87</sup>

c. Pembelajaran Tematik Kurikulum 2013

Implementasi pembelajaran tematik dilaksanakan oleh guru kelas sebagai implementator kebijakan. Materi-materi yang disampaikan disesuaikan dengan promes yang telah dibuat oleh pihak LPP. Seperti yang disampaikan oleh Ketua LPP Yayasan Nidaul Ishlah Banyumas sebagai berikut:

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan Koordinator atau Ketua Pembelajaran Tahfidzul Qur'an SDIT Mutiara Hati Purwokerto, Ustadz Wahyu Isnaeni pada tanggal 30 Juli 2019.

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan Koordinator atau Ketua Pembelajaran Adab SDIT Mutiara Hati Purwokerto, Ustadz Abdurrohman Hidayat pada tanggal 30 Juli 2019.

“pembelajaran tematik menurut saya bagus sekali mba diterapkan di negara Indonesia ini. Dari setiap indikatornya sudah memuat semuanya. Pendidikannya masuk, spiritualnya masuk, sosialnya masuk, bahkan segi keterampilannya ada. Namun di Mutiara Hati ini ada beberapa mata pelajaran yang kami hilangkan seperti menari, menyanyi pada mata pelajaran kesenian.”<sup>88</sup>

Guru mengembangkan setiap indikator yang terdapat pada promes menjadi Rencana Kegiatan (RKH) dan Rencana Kegiatan Pekan (RKP) atau dalam istilah lain yakni RPP. RKH dan RKP harus disetorkan oleh guru kepada pihak LPP secara kontinuitas atau berkesinambungan untuk melihat seberapa inovatif guru dalam mengembangkan promes. Pembelajaran tematik terdiri dari beberapa tahap seperti yang disampaikan oleh guru kelas 3A sebagai berikut:

“pertama masuk kelas saya mengkondisikan anak-anak terlebih dahulu mba, setelah kelas kondusif baru saya mulai dengan pembukaan. Pembukaan biasanya diawali dengan berdoa, mengucapkan salam, dan absensi. Setelah itu terkadang saya melakukan *ice breaking* berupa motivasi-motivasi atau kisah-kisah Nabi yang tujuannya menggugah semangat belajar siswa. Masuk ke pembelajaran inti, misal mata pelajaran IPA tema alam, nah disitu saya terkadang menggunakan media pembelajaran seperti alat peraga agar siswa lebih tertarik dan nyaman pada saat pembelajaran. Metode yang saya gunakan pun beragam, dan seringkali metode interaktif dua arah, jadi saya ngga sepenuhnya berceramah.”<sup>89</sup>

Implementasi kebijakan ini tentunya berdampak pada keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran. Berdasarkan wawancara dengan beberapa siswa SDIT Mutiara Hati dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran berbasis Tematik pada dasarnya menyenangkan, dan siswa jarang menemui kesulitan yang signifikan, jikalau ada hanya membutuhkan beberapa kali pengulangan pada tema yang sama.

#### **4. Monitoring Kebijakan (Pengawasan)**

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Ketua LPP Yayasan Nidaul Ishlah Banyumas, Ustadz Naryo pada tanggal 15 Juli 2019.

<sup>89</sup> Hasil Wawancara dengan Guru Kelas 3A SDIT Mutiara Hati Purwokerto, Ustadz Ahmad Waluyo pada tanggal 30 Juli 2019.

Kegiatan pengawasan dalam proses implementasi kebijakan sangatlah diperlukan guna mendapatkan gambaran mengenai proses tercapainya keberhasilan program-program yang menjadi isi dari kebijakan. Mengawasi sama halnya memantau, melihat apa saja yang terjadi pada saat kebijakan sedang diimplementasikan. Kepala SDIT Mutiara Hati Purwokerto bersama pihak LPP yayasan melakukan kegiatan monitoring kebijakan pada program kurikulumnya minimal satu kali dalam seminggu. Kegiatan yang dilakukan dengan cara memantau setiap ruang kelas saat berlangsungnya pembelajaran dan memberikan masukan kepada guru apabila terjadi kekeliruan penyampaian materi kepada siswa. Tujuan adanya kepemimpinan ganda berupa kepala sekolah yang terbagi menjadi dua yakni kepala ikhwan dan kepala akhwat yakni agar memudahkan proses koordinasi antar kepala ikhwan dan guru ikhwan, serta kepala akhwat dengan guru akhwat.

Seperti yang disampaikan oleh ketua LPP Yayasan Nidaul Ishlah Banyumas:

“setidaknya kami melakukan pemantauan minimal satu kali dalam seminggu. Bentuknya kami keliling-keliling ke kelas, melihat cara guru mengajar maupun respon siswa. Disini koordinasi terbagi menjadi dua jalur sih ya mba, kepala akhwat memantau khusus kelas akhwat dan kepala ikhwan bersama saya memantau khusus kelas ikhwan, barulah nanti di dalam rapat manajemen hasil dari pemantauan tersebut kami paparkan satu per satu.”<sup>90</sup>

Dari pemantauan tersebut didapatkan hasil untuk proses evaluasi atau perbaikan selanjutnya.

## **5. Evaluasi Kebijakan**

Kegiatan evaluasi atau penilaian terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan bertujuan untuk mendapatkan perbaikan agar pada implementasi selanjutnya dapat meminimalisir kesalahan dan kekurangan yang terjadi. Proses evaluasi yang dilakukan yayasan

---

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan Ketua LPP Yayasan Nidaul Ishlah Banyumas, Ustadz Naryo pada tanggal 15 Juli 2019.

nidaul islah terhadap implementasi kebijakan kurikulum yakni dengan diadakannya rapat manajemen pada hari Jum'at dan Sabtu setiap minggunya. Adanya rapat manajemen bertujuan untuk mendapatkan perbaikan-perbaikan terhadap kendala-kendala yang terjadi pada saat kebijakan diimplementasikan. Seperti yang dijelaskan ketua LPP Yayasan Nidaul Ishlah Banyumas sebagai berikut:

“untuk kegiatan evaluasi, kami selalu mengadakan rapat bersama tim manajemen setiap akhir pekan yaitu pada hari Jum'at dan Sabtu. Setelah lima hari pembelajaran pastinya banyak sekali keluhan-keluhan dari para guru seperti kesulitan dalam mengembangkan indikator pembelajaran atau modifikasi metode pembelajaran, nah dari situ kami musyawarahkan kembali agar kendala-kendala tersebut bisa teratasi dan para guru dapat mengajar dengan nyaman serta siswa yang diajarpun senang. Adanya perbaikan yang direkomendasikan seperti cara mengubah metode mengajar, penyederhanaan komposisi kurikulum, serta merubah iklim kelas diharapkan dapat menyempurnakan kurikulum kepada tingkatan yang lebih baik lagi.”<sup>91</sup>

Evaluasi tidak hanya dilakukan oleh pihak manajemen saja, namun guru sebagai implementator kebijakan pun mempunyai tugas tersendiri untuk melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran siswa, agar diketahui sejauh mana kemampuan dan pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan oleh guru. Evaluasi terhadap kurikulumnya sendiri yakni pada mata pelajaran yang diajarkan dalam bentuk penilaian yang bervariasi. Selain dalam bentuk PTS (Penilaian Tengah Semester) dan PAS (Penilaian Akhir Semester), evaluasi dilakukan dalam bentuk ulangan harian, kuis, serta setoran hafalan pada pembelajaran Tahfidzul Qur'an. Seperti yang disampaikan oleh Ustadzah Sindy Alwiansyah selaku guru kelas 4B akhwat:

“saya beragam mba cara penilainnya. Kadang untuk memacu belajar siswa saya adakan ulangan mendadak tanpa sepengetahuan siswa, pada mata pelajaran tertentu seperti IPA, Matematika selalu

---

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan Ketua LPP Yayasan Nidaul Ishlah Banyumas, Ustadz Naryo pada tanggal 15 Juli 2019.

wajib saya adakan ulangan harian setiap selesai satu persatu indikator.”<sup>92</sup>

Dari kegiatan evaluasi yang dilaksanakan oleh guru kelas, maka guru dapat mengambil kesimpulan hasil dari pembelajaran di kelas. Jika anak mendapatkan hasil yang baik pada setiap guru mengambil penilaian, dapat disimpulkan bahwa anak dapat memahami materi-materi yang disampaikan di kelas, dan sebaliknya jika hasil yang didapatkan pada saat penilaian tidak mencapai kriteria ketuntasan maka terdapat hal-hal yang diperbaiki kembali seperti penggunaan metode yang lebih tepat, ataupun menggunakan media pembelajaran agar siswa dapat memahami suatu materi dengan menyenangkan.

#### **6. Kendala-Kendala dalam Implementasi Kebijakan**

Dalam pelaksanaan kebijakan walaupun sudah dirancang sedemikian rupa dan didukung oleh sumber daya yang berkualitas, namun masih saja akan tetap menemui kendala-kendala yang terjadi. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan penetapan kurikulum pendidikan siswa SDIT Mutiara Hati Purwokerto adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pemahaman guru terhadap komponen-komponen yang terkandung dalam kurikulum 2013 sehingga diperlukan adanya waktu cukup lama untuk memahami isi dari komponen melalui program *workshop* terlebih dahulu. Adanya perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan dari adanya perubahan kurikulum KTSP ke Kurikulum 2013. Pergeseran dari standar isi mengenai bobot jam mata pelajaran yang ditambahkan dan pergeseran standar proses yang mengoptimalkan adanya perubahan metode dua arah yakni interaksi aktif dalam pembelajaran dari sebelumnya hanya terpusat oleh guru saja.

---

<sup>92</sup> Hasil Wawancara dengan Guru kelas 4B SDIT Mutiara Hati Purwokerto, Ustadzah Sindy Alwiansyah pada tanggal 30 Juli 2019.

- b. Adanya tambal sulam guru sehingga setiap tahunnya terjadi perubahan mengenai struktur guru kelas.
- c. Adanya bentrok waktu yang terjadi diantara waktu pembelajaran tahfidz dan pembelajaran inti.
- d. Banyaknya guru baru yang terkadang masih mengalami kesulitan dalam menginovasi metode pembelajaran di kelas, sehingga kelas cenderung jenuh, kurang kondusif, dan membosankan.
- e. Daya tangkap hafalan siswa yang berbeda-beda membuat guru harus memberikan jam tambahan lebih pada siswa yang hafalannya cenderung lambat.

### **C. Analisis Data**

Berdasarkan paparan penyajian diatas, bahwasannya kebijakan dalam bidang penetapan kurikulum pendidikan bagi siswa merupakan suatu hal yang sangat vital untuk dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal. Adapun yayasan Nidaul Ishlah Banyumas menerapkan kebijakan berupa dua pelaksanaan kurikulum yakni kurikulum khas yayasan yakni kurikulum pendidikan karakter berbasis fitrah dan kurikulum nasional yakni kurikulum 2013 berbasis tematik untuk tingkat pendidikan Sekolah Dasar. Adapaun analisis yang dilakukan penulis dalam implementasi kebijakan di bidang kurikulum yang terbagi menjadi ke dalam lima tahap yakni :

#### **1. Sosialisasi dan Uji Coba Kebijakan**

Sebelum kebijakan diimplementasikan, hal-hal yang perlu dilakukan yakni upaya persiapan-persiapan yang bertujuan untuk meminimalisir kendala yang terjadi di masa yang akan datang. Adapun persiapan-persiapan yang dilaksanakan diantaranya yakni perencanaan dan pengorganisasian kebijakan. Dalam perencanaan, di dalamnya

memuat mengenai menentukan isi materi atau mata pelajaran, dimana seluruh konsep dan desain kurikulum ditentukan langsung oleh pihak LPP yayasan sedangkan pihak sekolah hanya tinggal mengembangkannya ke dalam bentuk RKH dan RKP. Setelah menentukan konten atau isi materi, kemudian dilanjutkan dengan menentukan guru untuk proses berlangsungnya pembelajaran, serta menentukan pengalokasian anggaran dana sumber belajar untuk mobilisasi kegiatan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. Selanjutnya, pengorganisasian kebijakan. Pengorganisasian merupakan kegiatan untuk menentukan siapa saja orang-orang yang terlibat dalam kegiatan merumuskan isi kebijakan. Yayasan Nidaul Ishlah Banyumas memiliki tim khusus yang diberi nama “Tim Manajemen” yang di dalamnya merupakan orang-orang yang berwenang dan memiliki andil dalam proses perumusan kebijakan. Adapun klasifikasi tim manajemen yakni Ketua Yayasan, Ketua LPP beserta pengurusnya, Mudhir ‘Am, Kepala Sekolah Ikhwan dan Akhwat, Ketua atau Koordinator Tahfidzul Qur’an, dan Ketua Biah Islamiyyah (Pembelajaran Adab Islam).

Setelah persiapan selesai, pihak LPP Yayasan Nidaul Ishlah Banyumas mengadakan sosialisasi berupa pertemuan rapat guru yang di dalamnya membahas dan memberikan informasi lebih lanjut mengenai apa yang telah menjadi kesepakatan terutama dalam bidang kurikulum. Guru dibekali pengetahuan-pengetahuan berupa komponen-komponen kurikulum, cara mengembangkan promes dan membuat Rencana Kegiatan Harian (RKH) dan Rencana Kegiatan Pekan (RKP), dan khusus untuk guru tahfidz dibekali mengenai pengetahuan yang lebih mendalam mengenai makna Al-Qur’an dan kaidah tajwid. Selanjutnya, setelah guru menerima informasi-informasi yang berkaitan dengan hasil sosialisasi, maka kebijakan siap untuk diuji cobakan.

## **2. Validasi (Perbaikan dan Penyempurnaan)**

Setelah kebijakan diuji cobakan, tentunya yayasan akan menemui kendala-kendala terhadap seberapa jauh keberhasilan yang



telah dicapai. Dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan lamanya ternyata kebijakan belum dapat terealisasi dengan sempurna dan masih jauh dari harapan. Adanya *missed* komunikasi dan kurangnya pemahaman guru dalam mempelajari isi kurikulum menyebabkan pihak LPP yayasan Nidaul Ishlah berfikir kembali untuk melakukan upaya perbaikan dengan mengadakan kegiatan *workshop* yang diikuti oleh semua guru dengan narasumber pakar pendidikan.

### 3. Implementasi Kebijakan

Tahap implementasi merupakan suatu realisasi setelah diadakannya persiapan, uji coba, hingga perbaikan kebijakan. Pada tahap ini pihak yayasan, terutama pihak LPP berupaya lebih menggerakkan kembali sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya agar lebih mengoptimalkan kinerjanya sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan sesuai harapan. Adapun pelaksanaan kebijakan dan prosedur umum yang dilaksanakan SDIT Mutiara Hati yakni dari hal keberangkatan siswa, kegiatan dzikir pagi, halaqah tahfidz, penerapan adab islami, tematik, waktu istirahat, kegiatan makan siang bersama, sholat dzhur berjamaah, hingga kepulangan siswa. Sedangkan kebijakan pada bidang kurikulum pendidikan siswa diuraikan berikut di bawah ini:

a. Pembelajaran Tahfidzul Qur'an  
Pembelajaran yang terdiri dari 6 tahapan yakni tahap pembukaan, apersepsi, pembelajaran inti, tahsin, tilawah, penutup, dan evaluasi.

b. Pembelajaran Adab Islam

Implementasi pembelajaran adab termuat dalam pembelajaran tematik yang di dalamnya diselipkan pesan-pesan mengenai adab yang tersirat dalam tema yang diajarkan pada hari itu. Pembelajaran adab dilakukan dengan beberapa tahap yakni tahap sosialisasi guru pada siswa, tahap simulasi (guru mencotohkan pada siswa), tahap implementasi siswa sebagai upaya penerapkan apa yang sudah dicontohkan guru, dan tahap evaluasi.

c. Pembelajaran Tematik

Implementasi pembelajaran tematik dilakukan oleh guru kelas dengan mengembangkan apa yang termuat dalam promes menjadi bentuk RKH dan RKP. Pembelajaran tematik dilakukan dengan beberapa tahap yakni, pembukaan, pembelajaran inti, dan penutup.

#### **4. Monitoring Kebijakan**

Dalam pelaksanaan kebijakan, proses monitoring atau pengawasan sangatlah dibutuhkan untuk memantau sejauh mana tercapainya keberhasilan program-program yang menjadi isi kebijakan. Proses monitoring yang dilakukan disini yakni pihak LPP bekerjasama dengan Kepala Sekolah untuk memantau proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan guru dan siswa di kelas setidaknya minimal satu kali dalam seminggu. Adanya kepemimpinan ganda yakni kepala sekolah yang terbagi menjadi dua yakni kepala ikhwan dan akhwat berfungsi untuk memudahkan koordinasi dan pemantauan dikarenakan pemisahan ruang kelas antar lawan jenis.

#### **5. Evaluasi Kebijakan**

Tahap evaluasi bertujuan untuk mendapatkan perbaikan-perbaikan setelah adanya pelaksanaan, pengawasan, hingga ditemukannya kendala-kendala yang terjadi pada saat kebijakan diimplementasikan. Evaluasi disini dibagi menjadi dua macam yakni, evaluasi kebijakan oleh tim manajemen yayasan dan evaluasi pembelajaran oleh guru sebagai implementator kebijakan kepada siswa. Tahap evaluasi oleh tim manajemen dilaksanakan pada setiap akhir pekan yakni pada hari Jum'at dan Sabtu setiap minggunya. Evaluasi yang bertujuan untuk memperbaiki kendala dan meminimalisir keluhan-keluhan yang dilontarkan oleh guru dan mengupayakan adanya rekomendasi perbaikan kepada hal yang lebih baik lagi. Kemudian, evaluasi yang dilakukan guru sebagai implementator kebijakan yakni dengan mengadakan penilaian berupa ulangan harian, kuis, PTS, dan PAS sebagai upaya untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap apa yang sudah diajarkan oleh guru.

## 6. Kendala-Kendala Kebijakan

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan penetapan kurikulum pendidikan siswa SDIT Mutiara Hati Purwokerto adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pemahaman guru terhadap komponen-komponen yang terkandung dalam kurikulum 2013 sehingga diperlukan adanya waktu cukup lama untuk memahami isi dari komponen melalui program *workshop* terlebih dahulu. Adanya perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan dari adanya perubahan kurikulum KTSP ke Kurikulum 2013. Pergeseran dari standar isi mengenai bobot jam mata pelajaran yang ditambahkan dan pergeseran standar proses yang mengoptimalkan adanya perubahan metode dua arah yakni interaksi aktif dalam pembelajaran dari sebelumnya hanya terpusat oleh guru saja.
- b. Adanya tambal sulam guru sehingga setiap tahunnya terjadi perubahan mengenai struktur guru kelas.
- c. Adanya bentrok waktu yang terjadi diantara waktu pembelajaran tahfidz dan pembelajaran inti.
- d. Banyaknya guru baru yang terkadang masih mengalami kesulitan dalam menginovasi metode pembelajaran di kelas, sehingga kelas cenderung jenuh, kurang kondusif, dan membosankan.
- e. Daya tangkap hafalan siswa yang berbeda-beda membuat guru harus memberikan jam tambahan lebih pada siswa yang hafalannya cenderung lambat.

Untuk dapat mengkaji dengan baik suatu implementasi kebijakan perlu diketahui variabel atau faktor-faktor penentunya untuk menggambarkan secara jelas variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap implementasi kebijakan serta guna penyederhanaan pemahaman, maka akan digunakan model teori implementasi kebijakan. Peneliti menggunakan model teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III sebagai alat analisis yang bertujuan untuk membandingkan dengan hasil penyajian data. Faktor-faktor penentu keberhasilan

implementasi kebijakan dalam teori George C. Edwards III adalah sebagai berikut:<sup>93</sup>

**a. Komunikasi**

Komunikasi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan kurikulum di SDIT Mutiara Hati Purwokerto. Hal ini dikarenakan implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat. Namun masih sering terjadi *missed* komunikasi antar guru sebagai implementator kebijakan dengan pihak yayasan. Guru masih belum sepenuhnya memahami isi materi, dan masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan kurikulum. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan peran kepala sekolah untuk mengecek RKH dan RKP yang dibuat guru setiap minggunya, sehingga apabila terdapat koreksi tertentu segera dapat dikomunikasikan dengan tim manajemen untuk mendapatkan solusinya.

**b. Sumber Daya**

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber sumber daya manusia yang handal implementasi kebijakan akan berjalan lambat dan akan lebih sering menemui hambatan.

---

<sup>93</sup> Ade Risna Sari dan Martoyo, *Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 di Kota Pontianak*, Jurnal Tesis Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura, (Pontianak: Universitas Tanjungpura Pontianak, 2014), hlm. 5.

Implementator kebijakan yakni guru di SDIT Mutiara Hati Purwokerto 96% merupakan guru dengan kualifikasi sarjana pendidikan, sehingga setidaknya mengetahui cara-cara untuk mengembangkan isi dari kurikulum. Selain guru, fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dimiliki SDIT Mutiara Hati Purwokerto sudah dikatakan layak dan seimbang untuk kebutuhan guru dan siswa.

**c. Disposisi**

Sikap implementator kebijakan merupakan salah satu hal penting dalam tercapainya keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan. Setidaknya kejujuran, tanggungjawab, totalitas, dan komitmen yang tinggi harus ditanamkan guru sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan selaras dan berdampak baik bagi siswa. Sikap tersebut sudah diterapkan cukup baik oleh guru SDIT Mutiara Hati Purwokerto, karena sudah terdrottrin bahwasannya mengajar dan mendidik merupakan suatu kegiatan yang dinilai ibadah dengan pahala yang berlipat ganda.

**d. Struktur Birokrasi**

Struktur digunakan untuk memperjelas tugas dan wewenang masing-masing aktor kebijakan. Dengan adanya struktur yang tertuang dalam prosedur dasar kerja mempermudah dalam pembagian tugas sehingga pelaksanaan kebijakan terjalin kerjasama dan koordinasi yang baik. Yayasan Nidaul Ishlah memiliki tim manajemen, dimana di dalamnya memiliki tugas dan wewenang masing-masing yang nantinya akan mengkomandoni para guru SDIT Mutiara Hati dalam pelaksanaan kebijakan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Yayasan Nidaul Ishlah Dalam Penetapan Kurikulum Pendidikan Bagi Siswa SDIT Mutiara Hati Purwokerto dapat disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan terdiri dari lima tahap sebagai berikut yakni *pertama*, tahap sosialisasi dan uji coba kebijakan yang di dalamnya memuat kegiatan manajemen yaitu perencanaan dan pengorganisasian. Kegiatan perencanaan di dalamnya meliputi pembuatan isi atau konten materi yang akan diterapkan kepada siswa, menentukan guru pembelajaran, serta perincian alokasi dan sumber belajar dilanjutkan dengan kegiatan mengorganisasikan struktur birokrasi yang menjadi aktor sasaran kebijakan. *Kedua*, tahap validasi atau perbaikan dan penyempurnaan kebijakan. Pada tahap perbaikan ini ditemukan kendala-kendala seperti missed komunikasi antara pihak yayasan dan guru, sulitnya pemahaman guru dalam mendalami isi kurikulum sehingga diperlukan adanya tindak lanjut agar kebijakan dapat direalisasikan secara sempurna dan dengan menemui kendala yang seminim mungkin. *Ketiga*, tahap implementasi atau pelaksanaan secara penuh terhadap jenis kurikulum yang sudah ditetapkan yakni penerapan kurikulum pembelajaran tematik dan kurikulum khas yayasan yakni pembelajaran tahfidz Al-Qur'an dan biah Islamiyyah. Dilanjutkan pada tahap *keempat dan kelima* yakni tahap monitoring yang dilakukan secara internal oleh masing-masing kepala sekolah yang bekerja sama dengan ketua LPP untuk memantau dan mengawasi lajunya proses pembelajaran dan evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh tim manajemen sebagai aktor kebijakan dan guru SDIT Mutiara Hati sebagai implementator kebijakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan yayasan Nidaul Ishlah dalam hal penetapan kurikulum pendidikan bagi siswa dilaksanakan dengan mengedepankan nilai

humanisme dan religiusitas yang tinggi untuk mencapai target pencapaian keberhasilan program kebijakan secara optimal.

## **B. Saran-Saran**

Agar kebijakan mengenai bidang program kurikulum pendidikan yang ada di SDIT Mutiara Hati Purwokerto dapat dicapai hasil yang lebih maksimal dan memudahkan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, maka penulis menyampaikan beberapa pemikiran sebagai berikut setelah mendapatkan data dan referensi yang pernah penulis baca:

1. Membuat dokumen kebijakan berupa Surat Keputusan (SK) pada setiap kebijakan yang akan dilaksanakan, agar kebijakan mempunyai landasan dan lebih terarah dalam bentuk struktur tulisan.
2. Pihak LPP terus mengembangkan dan menginovasi isi kurikulum agar mampu bersaing secara optimal dengan sekolah lainnya.
3. Pembagian kerja pada aktor pembuat kebijakan yang lebih dioptimalkan lagi agar agenda-agenda kebijakan terlaksana dengan lebih maksimal.
4. Mengadakan lebih sering lagi kegiatan seminar, pelatihan atau kegiatan *workshop* untuk menambah wawasan para guru.
5. Guru hendaknya lebih mendalami strategi dan metode pembelajaran agar siswa belajar dengan lebih nyaman dan menyenangkan.
6. Pemberian jam pelajaran tambahan bagi siswa yang mengalami keterlambatan dalam menghafal Al-Qur'an.
7. Adanya kesadaran dari masing-masing guru dalam menggunakan ketepatan waktu mengajarnya agar tidak terjadi bentrok pada jam mengajar.

## **C. Kata Penutup**

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa teruntuk junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang semoga kelak kita akan mendapat syafa'atnya di yaumul akhir.

Rasa terimakasih penulis ucapkan pada semua pihak yang telah membantu dan ikut terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun secara tidak langsung, terutama doa dan dukungan dari kedua orangtua, keluarga serta sahabat. Ucapan terimakasih penulis khususkan kepada Bapak Dr. H. Suwito, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan penulis dengan penuh ikhlas dan kesabaran, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan membalas amal baik beliau dengan sebaik-baiknya balasan, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu segala masukan yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bisa memberi manfaat kepada penulis khususnya dan pada para pembaca yang mencintai ilmu pada umumnya, Aamiin.



IAIN PURWOKERTO



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahid, Nur. 2006. *Konsep dan Teori Kurikulum dalam Dunia Pendidikan*. Jurnal Ilmu Pendidikan. Diambil dari [https://www.researchgate.net/publication/286414734\\_Konsep\\_dan\\_Teori\\_Kurikulum\\_dalam\\_Dunia\\_Pendidikan/link/57a4a57c08ae455e85395b80/download](https://www.researchgate.net/publication/286414734_Konsep_dan_Teori_Kurikulum_dalam_Dunia_Pendidikan/link/57a4a57c08ae455e85395b80/download) diakses pada hari Kamis, 8 Agustus 2019 pukul 18.46.
- Amtu, Onisimus. 2011. *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Arifin, Zainal. 2012. *Pengembangan Manajemen Mutu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Diva Press.
- Arikunto, Suharsimi. 1990. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bintari, Antik. 2016. *Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2 No. 2 Oktober 2016. Bandung: Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Padjajaran), ISSN: 2442-5958, E-ISSN:m2540-86. Diambil di <http://journal.unpad.ac.id/cosmogov/article/download/10006/pdf> diakses pada tanggal 6 Agustus 2019 pukul 18.26.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Daryanto. 2014. *Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013*. Yogyakarta: Gava Media.
- Drajat, Manpan dan Ridwan Effendi. 2014. *Etika Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William N. 2000 *Analisis Kebijakan Publik*. (Terjemahan). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fattah, Nanang. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. 2013. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Feriyanto, Andri dan Endang Shyta Triana. 2015. *Pengantar Manajemen*. Kebumen: Media Tera.
- Hamalik, Oemar. 2017. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Herdiansyah, Haris. 2014 *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hermiono, Agustinus. 2017. *Manajemen Berbasis Sekolah di Daerah 3T dan Perbatasan Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Hikmawati, Fenti. 2017. *Metodologi Penelitian*. Depok : PT Rajagrafindo Persada.

- Ibrahim. 2018. *Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Negeri 33 Boddie Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep*. Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Ibrahim, Absari dan Irni Abdullah. 2015. *Pengertian Peran dan Fungsi Kurikulum*, Jurnal Ilmu Pendidikan. Ternate: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun Ternate. Diambil di <https://www.slideshare.net/mobile/mayawi/pengertian-45817652> diakses pada hari Kamis, 8 Agustus 2019 pukul 18.09.
- Janah, Farchatul Umi. 2011. “*Manajemen Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di MA Darunnajat Prowatan Bumiayu Tahun Pelajaran 2010/2011*”, Skripsi IAIN Purwokerto. Purwokerto: Program Strata 1 IAIN Purwokerto.
- Kurniawan, Asep. 2018. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Machali, Imam. 2014. *Kebijakan Perubahan Kurikulum 2013 dalam Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045*. Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 3, No. 1, Juni 2014/1435. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. DOI: 10.14421/jpi.2014.31.71-94, hlm. 73. Diambil di [https://www.researchgate.net/publication/280902180\\_Kebijakan\\_Perubahan\\_Kurikulum\\_2013\\_dalam\\_Menyongsong\\_Indonesia\\_Emas\\_Tahun\\_2045](https://www.researchgate.net/publication/280902180_Kebijakan_Perubahan_Kurikulum_2013_dalam_Menyongsong_Indonesia_Emas_Tahun_2045) diakses pada tanggal, 3 Mei 2019, Jam 08:01 WIB.
- Manab, Abdul. 2015. *Manajemen Perubahan Kurikulum*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Martiyono, 2014. *Mengelola dan Mendampingi Implementasi Kurikulum 2013*. Yogyakarta: Aswaja Presindo.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT remaja Rosdakarya.
- Muflihah, M. Hizbul. 2013. *Adminstrasi Pendidikan*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Mulyasa, E. 2018. *Implementasi Kurikulum 2013 Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Muhaimin. 2010. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mustafah, Jejen. 2016. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Nasution, S. 2003. *Asas-Asas Kurikulum*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Nurmareta, Eni. 2013. *Implementasi Manajemen Kurikulum Mata Pelajaran pendidikan Agama Islam Kelas Akselerasi di SMP Negeri 01 Kroya*

*Kabupaten Cilacap Tahun Pelajaran 2012/2013*” skripsi IAIN Purwokerto Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Purwokerto: Program Strata 1 IAIN Purwokerto.

Rahayu, Sri dan Zuli Qodir. 2016. *Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Pada Guru SMA di Kabupaten Kebumen*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 3 No. 3 Oktober 2016. Yogyakarta: Magister Ilmu Pemerintahan.

Riantini, Adelita. 2016. *Implementasi Kebijakan Kawasan Zona Pendidikan (Studi Kasus Kebijakan Kawasan Pendidikan di Jalan ZA. Pagar Alam, Gedong Meneng dan Rajabasa Bandar Lampung)*. skripsi Universitas Lampung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Ridoi, Ikbal. 2012. *Kurikulum Pendidikan di Sekolah Alam Banyu Belik Kedungbanteng Tahun 2011/2012* skripsi IAIN Purwokerto Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

Sari, Ade Risna dan Martoyo. 2014. *Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 di Kota Pontianak*. Jurnal Tesis Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura. Pontianak: Universitas Tanjungpura Pontianak.

Setiyowati, Ratna. 2012. *Implementasi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini di PAUD Roudlatul Jannah Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap*. skripsi IAIN Purwokerto Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Purwokerto: Program Strata 1 IAIN Purwokerto.

Siswanto dan Suyanto. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi Kualitatif dan Kuantitatif Pada Penelitian Tindakan (PTK dan PTS)*. Klaten.

Strauss, Anselm. dan Juliet Corbin. 2017. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. (Terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Sujarweni, Wiratna V. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.

Syarifudin. 2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tilaar, H.A.R dan Riant Nugroho. 2009. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Triwiyanto, Teguh. 2015. *Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Widyastono, Herry. 2015. *Pengembangan Kurikulum di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Wiyani, Novan Ardy. 2016. *Kapita Selekta PAUD*. Yogyakarta: Gava Media.

